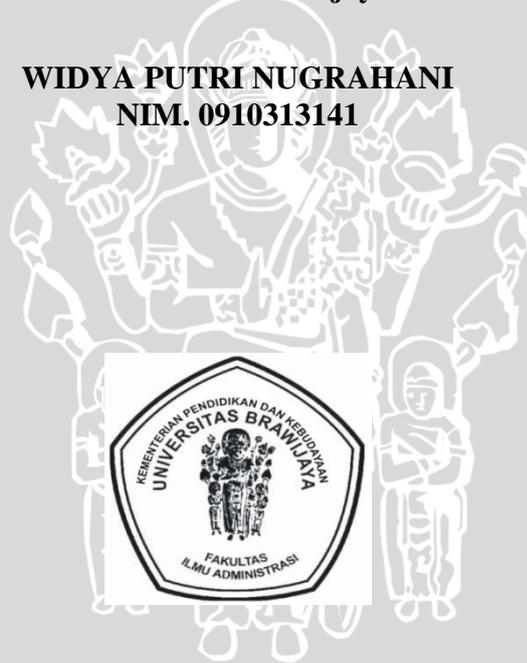


**IMPLEMENTASI PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH
KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**WIDYA PUTRI NUGRAHANI
NIM. 0910313141**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2013**

MOTTO

“Jangan Main-Main Dengan Sholat Lima Waktu”

(Alm. Ustadz Jefri Al Buchori)

***“Ditanganmulah wahai para pemuda masa depan bangsa dan negaramu
Maka bekalilah dirimu dengan ilmu, iman, dan taqwa kepada Allah SWT”***

(H. Abdullah Zaini D. Asnawi)

***“Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh apabila kita mau terus
belajar berbagai hal, dimanapun dan kepada siapa pun”***

(Chairul Tanjung)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
(RSDK) Kota Surabaya.

Disusun oleh : Widya Putri Nugrahani

NIM : 0910313141

Fakultas : Ilmu Administrasi

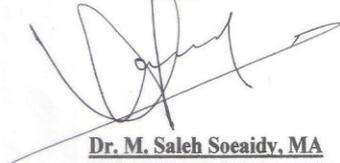
Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, 18 April 2013

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP 19540212 198103 1 006

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Mei 2013

Jam : 11.00 WIB

Skripsi atas nama : **WIDYA PUTRI NUGRAHANI**

Judul : **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI**

SOSIAL DAERAH KUMUH KOTA SURABAYA

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

KETUA



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

ANGGOTA



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

KETUA



Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001

ANGGOTA



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Mei 2013

Mahasiswa



Widya Putri Nugrahani

NIM. 0910313141

RINGKASAN

Widya Putri Nugrahani, 2013, **Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya**. Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. M. Saleh Soeaidy, MA ; Anggota : Drs. Heru Ribawanto, MS. 159 Hal

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh berbagai pemerintahan. Kemiskinan yang terjadi dapat dilihat salah satunya dari banyaknya permukiman kumuh yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan, salah satunya adalah upaya pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi permukiman kumuh melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program RSDK merupakan salah satu program yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dalam hal perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. Dengan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dapat menjadikan masyarakat mampu secara mandiri untuk mengatasi kemiskinannya.

Penelitian tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh ini dilakukan di Kota Surabaya. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mempermudah pengambilan data serta mengolahnya hingga menjadi kesimpulan, maka fokus penelitian yang ditetapkan adalah (1) Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya, yang meliputi (a) Tujuan dan Sasaran Program, (b) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana, (c) Sumber dan Alokasi Dana, (d) Penyiapan Kelembagaan/Organisasi, (d) Pelaksanaan Program di Masyarakat. (2) Dampak yang timbul dari pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang meliputi (a) Dampak terhadap perubahan ekonomi, (b) Dampak terhadap perubahan fisik, (c) Dampak terhadap perubahan sosial. (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang meliputi (a) Faktor pendukung yaitu dana dan sarana dan prasarana, (b) Faktor penghambat, yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengguliran dana.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan dalam segi fisik, sosial dan ekonomi. Perubahan dalam hal fisik sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya perbaikan rumah yang lebih layak huni sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat. Sedangkan dalam hal sosial diperuntukan kepada sumber daya manusia melalui pembentukan lembaga lokal di tiap kelurahan yang nantinya dituntut untuk ikut bekerjasama membantu dalam membina keluarga miskin penerima bantuan. Namun dalam segi perubahan ekonomi masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal. Permasalahan ini seharusnya dapat diatasi apabila masyarakat mampu menggulirkan dana bantuan yang nantinya dapat dijadikan modal usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Hal ini dituntut peran serta Pemerintah dan lembaga lokal untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan sosialisasi lebih lanjut.

SUMMARY

Widya Putri Nugrahani, 2013. **The Implementation of Social Rehabilitation for Slums (RSDK) Program in Surabaya City**. Promotor: Dr. M. Saleh Soeaidy, MA. Co-Promotor: Drs. Heru Ribawanto, MS. 159 pages

Poverty was a problem that was regularly challenging many governments. The presence of this poverty was shown by many slums where people lived within unreliable house. Government had taken various measures to deal with the poverty. One measure was taken by the government of Surabaya City to manage slums through a program called as Social Rehabilitation for Slums (RSDK – *Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh*). This program was oriented toward community empowerment which was manifested into the improvement of physical, social and economical environments of the slums. The empowerment might increase the sense of community's self-support to deal with their poverty.

Research was conducted at Surabaya City. Type of research was descriptive with qualitative approach. Research focused on some matters such as: (1) The implementation of Social Rehabilitation for Slums Program in Surabaya City, concerning with (a) the Objective and Target of the Program, (b) Communication between Related Organizations and Implementer Activities, (c) Source and Allocation of Fund, (d) Preparation of Organization, (e) The Implementation of Program in the Community; (2) The Impact from Social Rehabilitation for Slums Program, involving (a) Impact on economical change, (b) Impact on physical change, and (c) Impact on social change; (3) Factors supporting and constraining the implementation of Social Rehabilitation for Slums Program, including (a) Supporting factors were funding and structure and infrastructure, (b) Constraining factors were low participation of people and less understanding about the importance of funding.

Result of research indicated that the implementation of Social Rehabilitation for Slums Program was expected to benefit the acceptor people in term of physical, social and economical aspects. In relative with physical change, people in the slum settlement were receiving improvement for their houses into more reliable house or healthier shelter. The social change was realized by the empowerment of human resource through the founding of local organization at each village and the participation of this organization to counsel the poor as the acceptor of the grant. Economical change, however, was less than expected because of capital limit. The problem might be solved if the community could organize the funding aid to become work capital to increase family economic. It also needed the intervention of the government and local organization to increase the participation of community and to extend the socialization further.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelas Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R Khairul Muluk S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. M. Saleh Soeaidy, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing.
5. Seluruh dosen Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh & Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Surabaya.

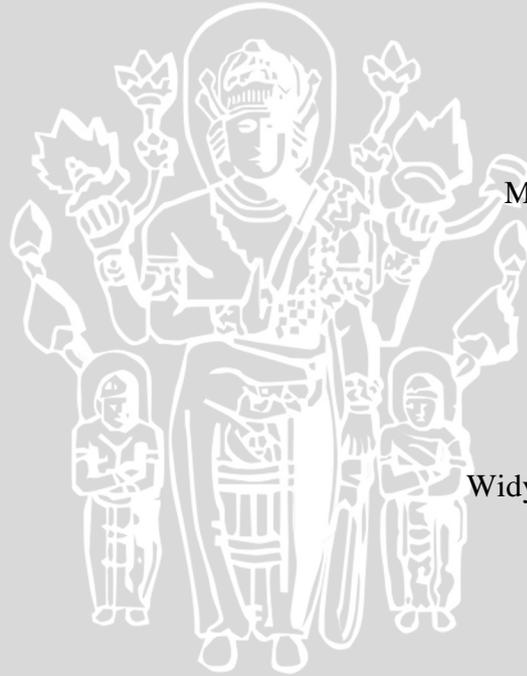
7. Ketua UPKM dan Warga penerima bantuan program RSDK Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Tambak Wedi, Kalijudan.
8. Teman-teman FIA jurusan Administrasi Publik angkatan 2009 yang telah memberikan semangat dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2013

Penulis

Widya Putri Nugrahani



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kemiskinan	
1. Definisi Kemiskinan.....	12
2. Jenis-jenis Kemiskinan.....	12
3. Pendekatan Kemiskinan	14
4. Konsep dan Aspek-aspek Kemiskinan	14
5. Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan.....	15
B. Teori Pemberdayaan Masyarakat	
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	16
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	17
3. Indikator Pemberdayaan	17
4. Pendekatan Pemberdayaan	18
C. Partisipasi Masyarakat	
1. Definisi Partisipasi	20
2. Jenis-jenis Partisipasi	21
3. Tahap-tahap Partisipasi	22
4. Cara atau Metode Partisipasi	22
D. Teori Program	
1. Program Pembangunan.....	23
2. Proyek Pembangunan	24
3. Siklus Pengelolaan Program Proyek	25



E. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	30
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

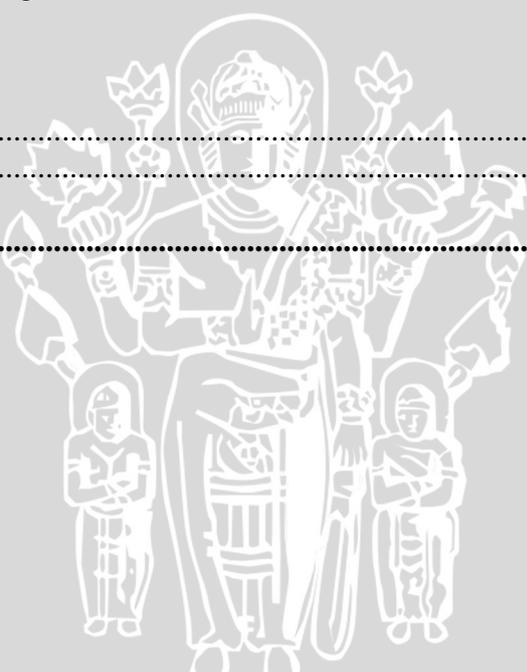
A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian.....	33
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Analisis Data	38
H. Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum	
1. Gambaran Umum Kota Surabaya	
a. Keadaan Geografis	43
b. Keadaan Demografi	53
c. Struktur Ekonomi	56
2. Profil Dinas Sosial Kota Surabaya	
a. Perkembangan Dinas Sosial Kota Surabaya	57
b. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Surabaya	59
c. Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya	60
d. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Surabaya	63
B. Penyajian Data dan Fokus	
1. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya.	
a. Tujuan dan Sasaran Program	76
b. Komunikasi Antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana	80
c. Sumber dan Alokasi Dana	85
d. Penyiapan Kelembagaan/Organisasi	87
e. Pelaksanaan Program di masyarakat.....	91
2. Dampak dari Program RSDK Kota Surabaya	
a. Dampak terhadap perubahan sosial	102
b. Dampak terhadap perubahan lingkungan	104
c. Dampak terhadap perubahan ekonomi	106
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan RSDK Kota Surabaya	
a. Faktor Pendukung	108
b. Faktor Penghambat	111
C. Analisis dan Interpretasi Data	
1. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)	

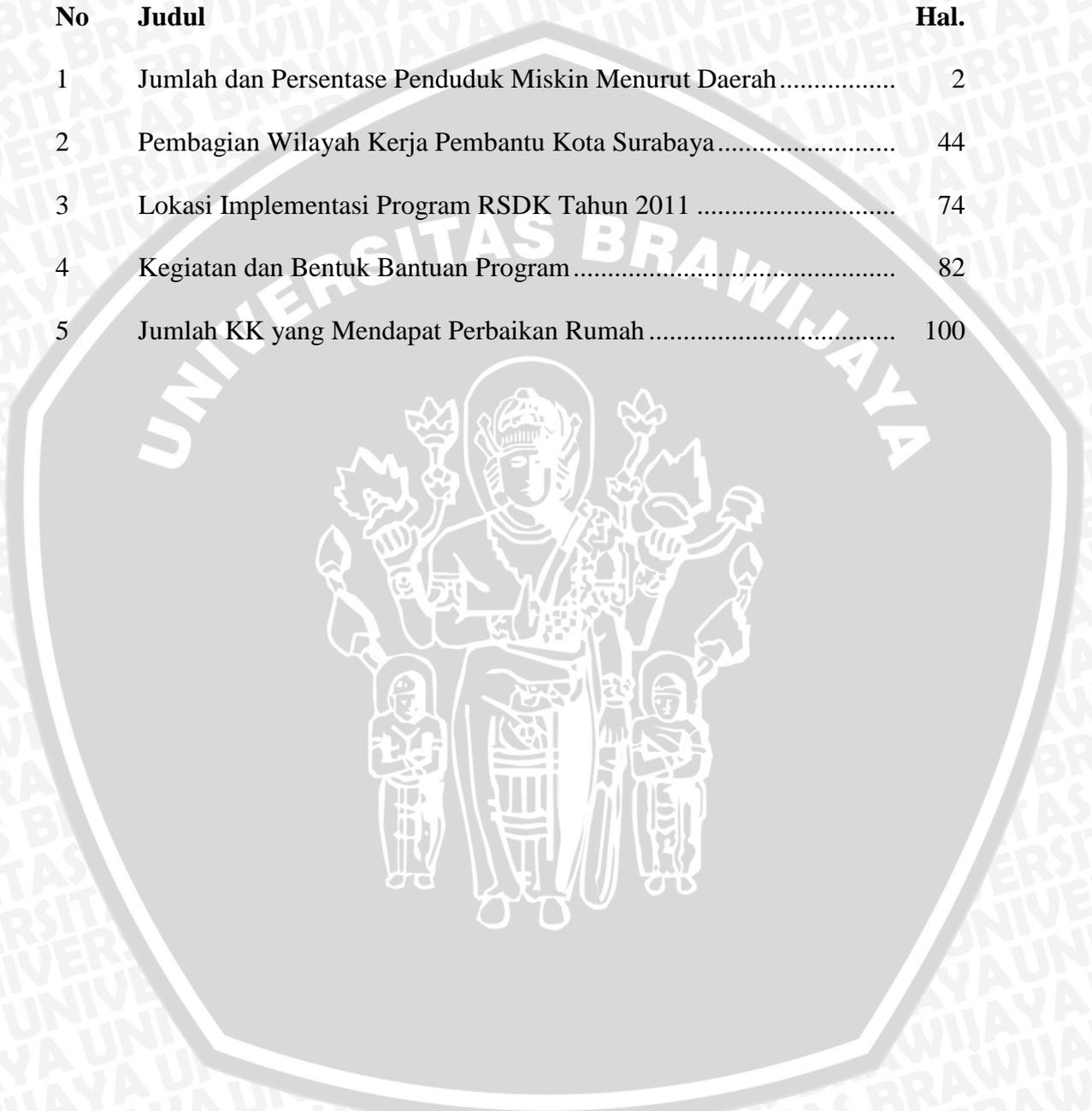


Kota Surabaya.	
a. Tujuan dan Sasaran Program	114
b. Komunikasi Antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana	116
c. Sumber dan Alokasi Dana	118
d. Penyiapan Kelembagaan/Organisasi	119
e. Pelaksanaan Program di masyarakat	122
2. Dampak dari Program RSDK Kota Surabaya	
a. Dampak terhadap perubahan sosial	125
b. Dampak terhadap perubahan lingkungan	129
c. Dampak terhadap perubahan ekonomi	132
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan RSDK Kota Surabaya	
a. Faktor Pendukung	134
b. Faktor Penghambat	137
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	142
B. Saran	145
 DAFTAR PUSTAKA	 147



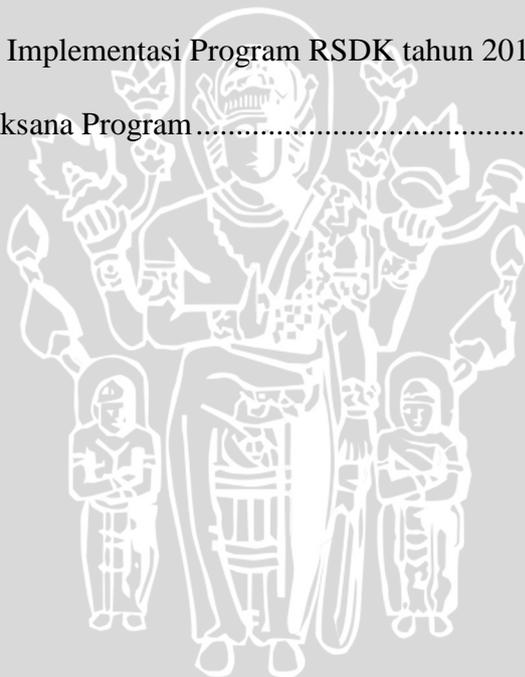
DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah.....	2
2	Pembagian Wilayah Kerja Pembantu Kota Surabaya.....	44
3	Lokasi Implementasi Program RSDK Tahun 2011	74
4	Kegiatan dan Bentuk Bantuan Program.....	82
5	Jumlah KK yang Mendapat Perbaikan Rumah	100



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No	Judul	Hal
1	Batas Wilayah Kota Surabaya.....	43
2	Penduduk Kota Surabaya Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	54
3	Piramida Penduduk Kota Surabaya.....	55
4	Struktur Ekonomi Kota Surabaya	56
5	Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya	61
6	Sebaran Lokasi Implementasi Program RSDK tahun 2011	75
7	Organisasi Pelaksana Program.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1	Sampling Foto Perbaikan Rumah	150
2	Sampling Foto Kegiatan Sosialisasi Tingkat Kota	151
3	Sampling Foto Kegiatan Sosialisasi Tingkat Kelurahan.....	151
4	Sampling Foto Penyiapan dan Pembekalan UPKM	152
5	Sampling Foto Pelatihan Keterampilan	153
6	Pedoman Wawancara	154
7	Pedoman Wawancara UPKM	155
8	Pedoman Wawancara Masyarakat	156
9	Curriculum Vitae.....	157
10	Surat Pengantar Riset dari Fakultas	158
11	Surat Pengantar Riset dari Bakesbangpol dan Linmas Kota Surabaya.	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Menurut World Bank (1990) (Suryono, 2010:233) mengemukakan kemiskinan adalah sebagai ketidak mampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep kemiskinan merupakan suatu masalah dalam pembangunan dengan ditandai oleh indikator adanya pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial.

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus disembuhkan atau dikurangi karena dapat mengganggu pembangunan nasional. Baswir (1999) (Suryono, 2010:236), menyebutkan beberapa jenis dan Penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan Natural (situasional) adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti cacat fisik atau karena bencana alam.
2. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan faktor budaya seperti ketidak disiplin atau malas.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata.

Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang yang masih mengalami problem ekonomi, dan hal ini telah turut menghambat lajunya proses

penyejahteraan kehidupan rakyat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia:

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2011-2012

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2011	11,05	9,23
Maret 2012	10,65	8,78
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2011	18,97	15,72
Maret 2012	18,48	15,12
<u>Kota+Desa</u>		
Maret 2011	30,02	12,49
Maret 2012	29,13	11,96

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2011 dan Maret 2012

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,65 juta orang pada maret 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang (dari 18,97 juta orang pada maret 2011 menjadi 18,48 juta orang pada maret 2012).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dipandang kurang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan sering tidak berkelanjutan, bahkan sering kali tidak tepat sasaran sehingga tidak mencapai hasil yang diharapkan. Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah lebih kepada penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, namun dalam hal kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, dimana menempati rumah tidak layak huni yang disebabkan masyarakat tersebut tidak memiliki biaya untuk dapat memperbaiki rumah mereka karena keterbatasan penghasilan. Selain itu dapat menimbulkan pemukiman kumuh di daerah perkotaan.

Hal ini mengakibatkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dianggap sia-sia karena tidak dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah membuat program dimana program tersebut dengan pendekatan memberdayakan masyarakat miskin. Menurut Suryono (2010:262), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya bagi masyarakat yang kurang memiliki akses pada sumber-sumber daya pembangunan) harus didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam hal ini, ada empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain:

1. Memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek.

2. Mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif, demokratis, efektif dan efisien.
3. Mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya.
4. Memaksimalkan peran pemerintah (khususnya pemerintah kelurahan atau desa) dalam memfasilitasi dan mengatur pelaksanaannya guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini diperlukan peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam pembangunan daerah. Sesuai dengan adanya UU nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, mengalami perkembangan yang cukup pesat dan telah menjadi daya tarik terkuat bagi masyarakat di daerah penyangga, terutama daerah pedesaan di sekitar kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya dari hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 2.765.487 jiwa. Keberadaan Kota Surabaya yang seperti ini merupakan bagian dari daerah perkotaan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, para masyarakat yang berasal dari desa datang ke Kota Surabaya dikarenakan di

Surabaya terdapat banyak pilihan untuk memperoleh berbagai kesempatan dalam upaya memperbaiki kehidupan mereka. Namun perkembangan pesat kehidupan perkotaan seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan kota, sehingga mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan bahwa, angka kemiskinan tahun 2010 mencapai 112.465 keluarga miskin. Hal ini diperjelas dengan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kota Surabaya, yang diungkapkan oleh Agus Hariyanto, Community Organisation Habitat for Humanity Indonesia. Dimana sedikitnya ada 20-35 rumah tak layak huni dan tak sehat dalam setiap kecamatan (<http://m.beritajatim.com>). Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Surabaya tidak hentinya terus berupaya dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah dengan pelaksanaan program terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. Hal-hal yang berkaitan dengan program RSDK telah diatur dalam peraturan walikota yang telah diperbaharui, yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program kepastian hukum yang jelas dan wajib untuk dilaksanakan. Program ini pada tahun 2011 dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang tersebar di 14 kecamatan pada 21 kelurahan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) adalah program refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat atau seseorang agar mampu

melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan kampung yang kondisi lingkungannya masih memerlukan perbaikan. Program RSDK Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*).

Program RSDK ini dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up* dimana pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat. Mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program ini. Sehingga keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan RSDK ini hanyalah merupakan salah satu implementasi program yang dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Surabaya. Untuk memberi kesempatan pada peran serta warga masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan maka mobilisasi dana swadaya masyarakat dimungkinkan dilakukan secara koordinatif dengan pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan. Sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan inisiatif, kreatifitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan dilingkungan tempat tinggalnya.

Namun mengingat kondisi rumah keluarga miskin di Kota Surabaya secara umum dapat dikatakan belum memenuhi syarat, baik persyaratan teknis maupun syarat kesehatan. Masih banyak rumah yang ber dinding triplek, plafon banyak

yang rusak akibat kebocoran, tidak ada jendela atau ventilasi dan masih banyak hal lain yang perlu dibenahi. Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Sosial memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk memperbaiki kondisi rumah. Namun dengan bantuan perbaikan rumah tersebut apakah mampu membantu masyarakat untuk memberdayakan diri dari segi ekonomi dan sosialnya.

Dalam pelaksanaan program ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta bagaimana perkembangan perubahan kondisi kemiskinan pada masyarakat diperlukannya sistem analisis pada implementasi pada program RSDK. Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006:81) (dalam Pasolong, 2010:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rancangan ke dalam praktik.

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ini membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Namun, implementasi ini sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan kepentingan partai. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

Gordon, 1986 (dalam Pasolong, 2010:58), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Berdasarkan pemikiran di atas tentang pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) mendorong penulis untuk meneliti dan memberikan gambaran lebih lanjut di dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya?
2. Apakah dampak yang timbul dari program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya terhadap penanggulangan kemiskinan?
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis implementasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis dampak yang timbul dari program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya terhadap penanggulangan kemiskinan.
3. Mendiskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain dan dapat memberikan manfaat yang positif. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademik

- a) Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan studi administrasi publik, terutama tentang program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya dalam penanggulangan kemiskinan.
- b) Referensi dan informasi mengenai pelaksanaan program yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

2. Kontribusi Praktis

- a) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu program atau kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b) Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan sehingga lebih terarah secara sistematis, maka penulisan dalam skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian tentang “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya”.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang berupa data-data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian. Data tersebut akan dianalisa dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga arti atau makna yang terkandung di dalam data tersebut akan diketahui.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran terhadap kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Definisi umum mengatakan, bahwa kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada dalam suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, kesempatan berusaha, pendidikan, dan fasilitas hidup lainnya. Kemiskinan dalam arti luas dapat meliputi kemiskinan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik maupun iman dan akhlak (Suryono, 2010:233).

Menurut definisi World Bank, 1990 (dalam Suryono, 2010:233) kemiskinan adalah sebagai ketidak mampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep ini merupakan suatu masalah dalam pembangunan dengan ditandai oleh indikator adanya pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial. Menurut Chambers (1987), kemiskinan dianggap sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidak pastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat.

2. Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut World Bank, 1990 (dalam Suryono, 2010:233), menyatakan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a) Kemiskinan absolut. Seseorang atau kelompok orang dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan.

- b) Kemiskinan relatif. Keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan warga yang lain (disatu wilayah), dan kelompok masyarakat yang relative lebih kaya ditempat lain. Pada umumnya kemiskinan relative ini lebih disebabkan karena ketimpangan distribusi pendapatan dengan ukuran pendapatan perkapita.

Baswir, 1999 (dalam Suryono, 2010:236), menyebutkan beberapa jenis kemiskinan dan sekaligus faktor penyebab kemiskinan, yaitu:

- a) Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti cacat fisik atau karena bencana alam.
- b) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti ketidak disiplin atau malas.
- c) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata.

Menurut Dewanta, 1995 (dalam Suryono, 2010:237) mengidentifikasi beberapa penyebab orang menjadi miskin, antara lain:

- a) Karena perbedaan akses ekonomi yang dimiliki.
- b) Karena ketidak beruntungan (*lucky*) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin.

- c) Karena ketimpangan distribusi.
- d) Karena pembangunan dianalogkan dengan ideology (partai).
- e) Karena kesalahan strategi pembangunan dan industrialisasi.
- f) Karena adanya intervensi pemerintah yang berlebihan.

3. Pendekatan Kemiskinan

Menurut World Bank secara teoritis terdapat tiga pendekatan ilmiah yang cukup populer di dalam memahami masalah kemiskinan yakni:

- a) Pendekatan kultural, dimaksudkan bahwa kemiskinan adalah merupakan produk dari suatu proses kebudayaan yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama.
- b) Pendekatan situasional, menggambarkan bahwa orang miskin itu timbul karena adanya situasi lingkungan yang menekan.
- c) Pendekatan interaksional, dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa perilaku dan ciri-ciri yang ditampilkan para kaum miskin adalah merupakan hasil interaksi antar faktor-faktor kebudayaan yang sudah tertanam di dalam orang miskin (Suryono, 2010:233)

4. Konsep Dan Aspek-Aspek Kemiskinan

Suryono, 2010:245, mengatakan bahwa terdapat beberapa konsep dan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, yaitu:

- a) Kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek. Dilihat dari perspektif kebijakan, kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset-aset, organisasi social politik,

pengetahuan dan ketrampilan, aspek sekondert berupa miskin akan jaringan social, sumber-sumber keuangan dan informasi.

- b) Aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan, baik langsung ataupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan kemunduran oada sakah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek lainnya.
- c) Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individu atau kolektif.
- d) Bahwa ada dua perspektif untuk memahami kemiskinan, yaitu:
 - 1) Kemiskinan sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, kemiskinan merupakan cerminan kegagalan suatu system masyarakat dalam mengalokasikan sumberdaya dan dana secara adil kepada para anggotanya.
 - 2) Kemiskinan sebagai akibat dari fenomena social dan cultural yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri.

5. Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan

Menurut Suryono, 2010:247, upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang memiliki ciri multidimensional akan memerlukan keterlibatan banyak pihak secara terpadu. Cara paling populer yang dilakukan saat ini dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah dengan pendekatan strategi pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan msyarakat lewat perwujudan potensi yang dimiliki.

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memulai pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a) Bantuan dana sebagai modal usaha awal.
- b) Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan social-ekonomi rakyat.
- c) Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat.
- d) Pelatihan bagi aparat dan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.
- e) Adanya penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat.

B. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Friedman, 1992 (dalam Suryono, 2010 : 260), menyatakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan *resultante* dari kegagalan arus utama model pengembangan ekonomi berupa ketidakmampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan, sehingga membutuhkan sebuah alternatif pembangunan yang lain. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari kekuatan masyarakat itu sendiri.

Menurut Suryono (2010 : 262), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya bagi masyarakat yang kurang memiliki akses pada sumber-sumber daya pembangunan) harus didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Schumacker (Sudarwati, 2009:80) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah menyangkut sebuah kekuatan dalam masyarakat adalah jumlah, maka bisa disebut kekuatan masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negative terhadap kekuasaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan peningkatan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

2. Tujuan Pemberdayaan masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Sulistiyani, 2004:80).

3. Indikator pemberdayaan

Parson et.al. dalam Suharto (2006:63) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan yang politisi orang-orang lemah kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

4. Pendekatan Pemberdayaan

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal yang merupakan mekanisme perencanaan *people centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Adapaun tujuan yang dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya. Dalam hal ini ada tiga pendekatan pokok dalam upaya pemberdayaan masyarakat (miskin), yaitu:

- a) Pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin.
- b) Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi.
- c) Pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh

pendamping yang professional sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisor terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Suryono, 2010 : 262).

Menurut Suharto (2006:66) terdapat 5 pendekatan pemberdayaan, yaitu:

- a) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong

masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- d) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

C. Partisipasi Masyarakat

1. Definisi Partisipasi

Ada yang mengatakan bahwa partisipasi merupakan kemampuan mendengarkan secara bijak suara-suara (rakyat) yang tersembunyi. Sehingga dapat mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan oleh rakyat dalam pembangunan. Pada kasus-kasus pembangunan, perlu dipikirkan metode alternative yang tepat untuk mengungkap kebutuhan mendasar rakyat semisal model *Participation Action Research* (PAR) yang menegaskan bahwa keterlibatan manusia secara total sangat diperhatikan. Artinya, posisi birokrasi atau peneliti cukup mendengarkan, mengartikan dan menterjemahkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Keterlibatan rakyat diperlukan untuk memadukan atau mengawinkan model *top down* dengan *bottom up* agar program-program pembangunan dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu menjadi sarana motivasi rakyat untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap hasil-hasil dan pelaksanaan pembangunan (Suryono, 2010:254).

Partisipasi sering dipahami secara keliru dan sepihak. Para perencana pembangunan, pemerintah dan aparatnya memahami partisipasi sebagai dukungan yang harus diberikan oleh rakyat pada keputusan rencana pembaangunan yang sudah diputuskan dari atas (*top down*). Bila rakyat tidak patuh dan tidak mau mendukung berarti tidak berpartisipasi. Pandangan ini memperlakukan dan memposisikan rakyat sebagai obyek pembangunan dan segala usul, aspirasi berasal dari rakyat (*bottom up*) dianggap sebagai keinginan belaka.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Slamet, 1980 (dalam Suryono, 2010:256) diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2. Jenis-jenis Partisipasi

Menurut Slamet , 1980 (dalam Suryono, 2010:256), ada lima jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- a) Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya;
- b) Ikut memberi input dan menikmati hasilnya;
- c) Ikut memberi input dan menerima imbalan, tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung;
- d) Menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input, dan;
- e) Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.

Pendapat yang sama, disampaikan Ndraha (1982) yang menyebutkan enam macam bentuk partisipasi, yaitu: (1) partisipasi dalam menerima dan member informasi, (2) partisipasi dalam memberikan tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak maupun yang bermaksud menerima, (3) partisipasi dalam bentuk perencanaan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan, (4) partisipasi dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan, (5) partisipasi dalam menerima hasil pembangunan, (6) partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

3. Tahap-tahap Partisipasi

Ndraha (dalam Suryono, 2010:257) menegaskan bahwa dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengalami tahapan-tahapan partisipasi, antara lain:

Tahap pertama, partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. *Tahap kedua*, partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), meng-iyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya. *Tahap ketiga*, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan. *Tahap keempat*, partisipasi dalam dalam pelaksanaan operasional pembangunan. *Tahap kelima*, partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang bermanfaat (*participation in benefits*). *Tahap keenam*, partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Cara atau Metode Partisipasi

Adapun cara atau metode menggerakkan partisipasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

- a) Disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat (*felt need*).

- b) Dijadikan stimulasi terhadap kesadaran masyarakat untuk membangun, dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong timbulnya tanggapan (*response*) yang dikehendaki bersama.
- c) Dijadikan langkah motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi untuk membangkitkan perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, praktek kerja dan status kehidupan mereka secara berlanjut.
- d) Proyek pembangunan yang dirancang sedemikian rupa secara sederhana, mudah dikelola, dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- e) Adanya dukungan organisasi dan kelembagaan masyarakat yang mampu mengerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara terbuka dan independen.
- f) Adanya peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan secara aktif.
- g) Partisipasi itu harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Dan manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- h) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat; terutama keterlibatan mereka dalam proses monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan secara perwakilan atau representatif.
- i) Perlu disadari bahwa dalam partisipasi masyarakat berlaku juga prinsip teori pertukaran dasar (*Basic Exchange Theory*) yakni, semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, maka semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan. Sehingga pemerintah mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana dalam hal ini dapat tercapainya hasil yang diinginkan.

D. Teori Program

1. Program pembangunan

United Nation, 1971 (dalam Zauhar, 1993:1) mengatakan bahwa:

“Programme is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated

group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities”.

Dengan suatu program pembangunan berbagai macam masalah pembangunan dan kemasyarakatan dicoba dipecahkan. Dengan demikian semakin banyak permasalahan yang timbul maka semakin banyak pula program yang dibutuhkan. Dalam suatu program selalu memiliki tujuan, agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik maka suatu program harus memiliki ciri yaitu:

- a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b) Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program.
- d) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan, akan dihasilkan dari program tersebut.
- e) Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.
- f) Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

2. Proyek Pembangunan

Dalam suatu program pembangunan selalu berkaitan dengan proyek pembangunan, karena pada hakekatnya proyek pembangunan merupakan penjelasan lebih operasional dari suatu program. Secara singkat proyek dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dengan cara kerja tertentu, criteria keberhasilan, lokasi yang jelas, jumlah biaya yang pasti, sumber pembiayaan yang

telah ditetapkan, dan dikelola oleh sekelompok orang yang secara khusus ditunjuk untuk itu” (siagan, 1984:164) dalam Zauhar, 1993: 3.

United Nations, 1971 (dalam Zauhar: 1993:3), menjelaskan ciri-ciri umum suatu proyek adalah :

- a) Proyek lebih menekankan kepada tujuan-tujuan yang lebih dekat. Bagaimana mencapai suatu hasil tujuan dalam periode yang relatif lebih singkat dengan mengusahakan sumber-sumber pembiayaannya dan merencanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu proyek berorientasi kepada kegiatan.
- b) Seharusnya kegiatan usaha untuk mencapai tujuan proyek tidak berlaku terus-menerus. Pencapaian tujuan proyek tidak dapat dilakukan melalui kegiatan rutin dari suatu badan pemerintahan.

Aspek administrasi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu proyek adalah tahap-tahap yang harus dilalui. Tahap-tahap pengembangan suatu proyek adalah pencetusan ide atau gagasan, formulasi rencana atau program kerja proyek, laporan dan arus balik, kemudian evaluasi dari pelaksanaan hasil proyek.

3. Siklus Pengelolaan Program Proyek

- a) Perencanaan

Tahap awal dari suatu pengelolann program dimulai dengan konseptual dan identifikasi. Suatu ide tentang program dan proyek perlu ditindak lanjuti, dalam bentuk pembicaraan resmi yang akhirnya tertuang dalam bentuk usulan tertulis. Kegiatan ini biasa disebut dengan pra studi kelayakan. Tujuan dilakukan pra studi kelayakan ini ialah untuk memberikan justifikasi bahwa program dan

proyek yang diusulkan merupakan kegiatan yang logis dan penting. Untuk mengetahui apakah suatu program dan proyek logis dan penting dapat dilihat dari efisiensi penggunaan tenaga, waktu dan biaya.

Tahap kedua adalah melakukan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini harus memuat informasi serta analisis yang berkaitan dengan:

- 1) Segi ekonomi dari suatu proyek;
- 2) Segi keuangan suatu proyek terutama sumber pembiayaannya;
- 3) Segi teknis suatu proyek, khususnya dalam pelaksanaan dan pengoperasian proyek;
- 4) Dampak politik suatu proyek yang sering merupakan pertimbangan yang dominan dalam memproyektikan suatu kegiatan;
- 5) Segi manajemen suatu proyek dalam arti tersedianya tenaga pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan proyek, dan
- 6) Desain sementara suatu proyek (Siagan, 18884:168) dalam Zauhar, 1993:5.

Tahap ketiga adalah tahap desain yang akan menggambarkan rincian yang lebih detail dari suatu program atau suatu proyek. Jika desain memenuhi persyaratan teknis, ekonomi, financial, sosial dan politik tahap berikutnya adalah persetujuan (*approval*). Disetujui tidaknya suatu program dan proyek merupakan indikasi kualitas dari suatu perencanaan. Semakin berkualitas suatu perencanaan program dan proyek, semakin besar kemungkinannya untuk disetujui. Dalam tahap ini diperlukan juga analisa tujuan yang merupakan tolak ukur untuk mengukur sejauh mana suatu proyek memenuhi tujuan-tujuan yang dirumuskan.

Tahap terakhir dari perencanaan program dan proyek adalah tahap persiapan pelaksanaan. Dalam tahap ini segala aspek yang berkenaan dengan program dan proyek seperti kepegawaiannya, organisasinya, peralatan dan perlengkapan, keuangan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah administrative perlu diperhitungkan dengan teliti dan cermat.

b) Implementasi Program Dan Proyek

Dari pengerian program jelas bahwa program terdiri dari bejenis-jenis proyek yang terkait satu sama lain. Dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan aspek koordinasi dan konsistensi mejadi sangat penting. Dimana keberhasilan program dan proyek sangat tergantung pada kerja sama dengan oganisasi/instansi yang terkait. Walaupun koordinasi merupakan hal yang amat vital dalam implementasi program dan proyek, namun tidak semua program dibentuk koordinator program. Selain persoalan koordinasi, keberhasilan program dan proyek sangat dipengaruhi oleh keteladanan pimpinan program dan proyek.

Di samping masalah sumber daya insani, bahan dan perlengkapan, masalah yang sering menghambat implementasi program dan proyek adalah masalah biaya. Hal ini terutama sekali muncul jika program dan proyek dibiayai dari sumber yang beragam. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam impelentasi adalah tata kerja. Dalam hal ini perlu diatur secara jelas tentang pembagian tugas dalam organisasi, komunikasi dalam organisasi seperti system pelaporannya.

Langkah penting dalam implementasi adalah pengendalian pelaksanaan. Sasaran dalam pengendalian adalah yang berkaitan dengan tujuan, sehingga pencapaian tujuan dapat lebih terjamin. Dengan pengendalian pelaksanaan inilah

langkah penting dan strategis dapat segera diambil manakala terjadi gejala penyimpangan.

c) Evaluasi dan Monitoring

Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti, mengamati dan melacak jalannya pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan menggunakan system pelaporan dan tujuan langsung ke lokasi agar memperoleh data dan informasi yang jelas serta menghimpun masalah yang ada untuk segera dijadikan alternative pemecahan sebagai input penyempurnaan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dari dekat pelaksanaan pembangunan dan mengidentifikasi tindakan korektif kemudian dimungkinkan untuk pengambilan penyesuaian serta mendukung usaha penyempurnaan. Monitoring dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Monitoring umum, adalah monitoring yang melihat semua kegiatan pembangunan sebagai obyeknya. Monitoring umum ini berfungsi mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut secara fungsional dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan.

Monitoring umum dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Umpan balik
- b. Peninjauan lapangan, tujuan peninjauan lapangan adalah untuk (1) mengamati perkembangan kegiatan pembangunan secara keseluruhan yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana teknis pembangunan untuk dikaji apakah sesuai dengan tujuan dan

arah serta kebijaksanaan pembangunan. (2) untuk menguji kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelaksana teknis pembangunan dan atau oleh pimpinan proyek.

2) Monitoring proyek, adalah monitoring yang melihat kegiatan-kegiatan dalam suatu proyek sebagai obyek. Monitoring ini berfungsi mengamati dan mengawasi secara terus-menerus bagaimana hasil guna dan daya guna kegiatan-kegiatan tersebut dalam hubungan dengan penggunaan input proyek, untuk mencapai hasil proyek yang diharapkan, serta berfungsi untuk mengamati apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Untuk memudahkan pengendalian maka kegiatan monitoring terhadap setiap proyek yang telah disetujui harus dilengkapi dengan suatu kerangka proyek yang menggambarkan:

- a. Hierarki harapan yang hendak dicapai dari suatu proyek yang terdiri dari : tujuan program, tujuan fungsional proyek, keluaran proyek, masukan proyek.
- b. Indikator-indikator yang diperlukan sebagai ukur pengukuran kemajuan tiap-tiap hierarki dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan pula unsure evaluasi yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- c. Alat bukti indikator yaitu teknik/cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, pengolahan dan analisa data dalam rangka membuktikan kebenaran indikator-indikator yang telah dicapai. Data yang dikumpulkn dapat bersifat internal dan external.

- d. Faktor ketidakpastian adalah asumsi yang harus ditetapkan untuk mengidentifikasi hal-hal diluar jangkauan management proyek, yaitu faktor-faktor yang harus diidentifikasi sebelum proyek dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan memiliki keterkaitan erat dengan program pembangunan. Dimana proyek pembangunan merupakan penjelasan lebih operasional dari suatu program. Suatu proyek atau program sangat dibutuhkan suatu monitoring atau evaluasi dalam pelaksanaan.

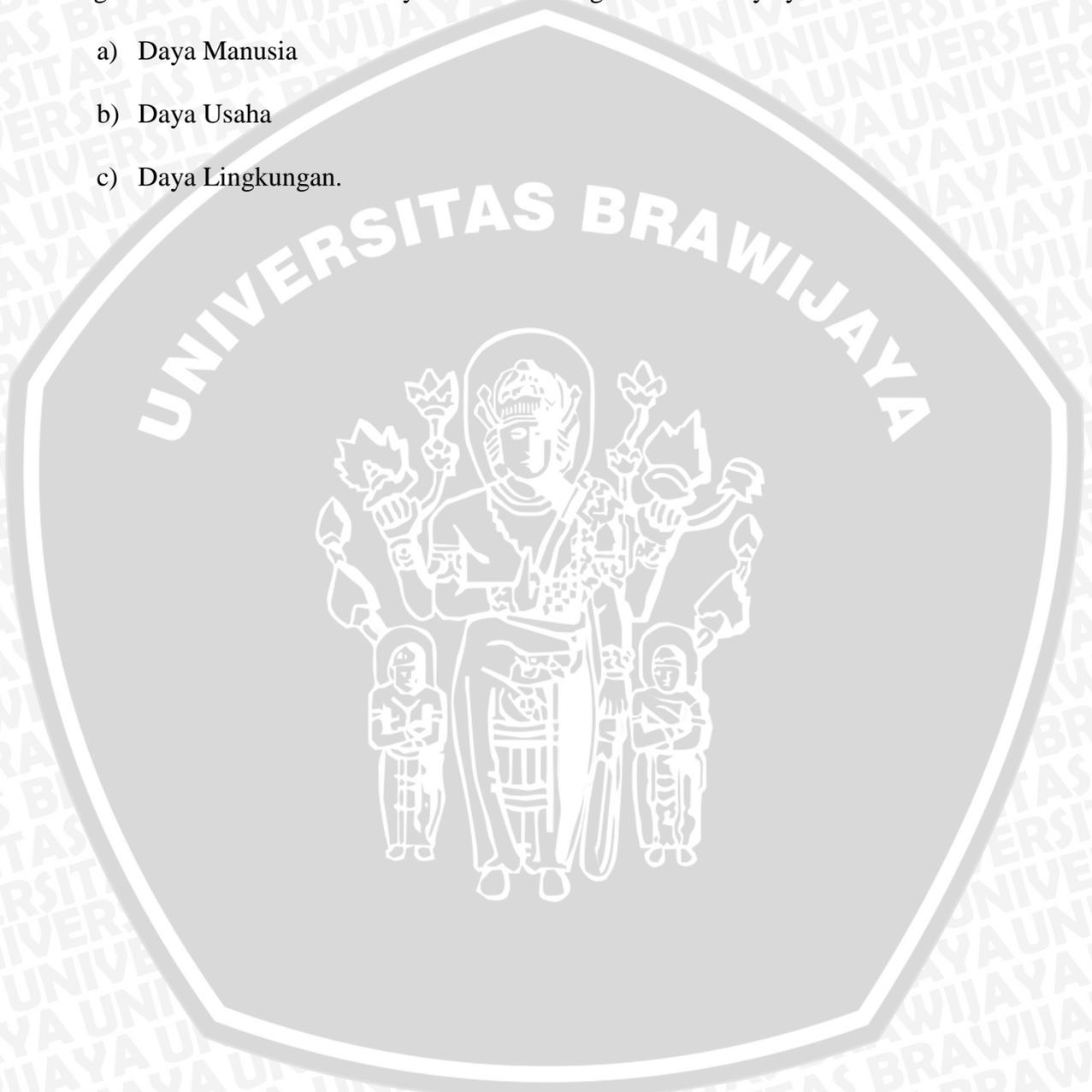
E. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

Masalah perumahan merupakan salah satu fenomena kemiskinan yang paling menonjol di wilayah perkotaan. Program perbaikan kampung yang dilaksanakan saat ini merupakan program pembangunan berbasis masyarakat dengan menitik beratkan pada pemberdayaan warga. Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Surabaya menetapkan kebijakan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang selanjutnya disingkat RSDK adalah program refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat atau seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan kampung yang kondisi fisik lingkungannya masih memerlukan perbaikan.

RSDK, diimplementasikan dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pelaksanaan Program RSDK di Kota Surabaya dilakukan dengan Pola Tridaya yaitu :

- a) Daya Manusia
- b) Daya Usaha
- c) Daya Lingkungan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, dan *kegunaan*. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Untuk mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian sering sulit dilakukan, oleh karena itu data yang telah terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dapat diuji melalui pengujian *reliabilitas* dan *obyektivitas*. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan (Sugiyono, 2009:2). Menurut Nazir (2003:14) penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi. Penelitian dapat digunakan sebagai pencari pengetahuan dan pemberian artian secara terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan suatu percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003:54).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009:9).

Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008,1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam hal ini, peneliti terlibat langsung dalam keadaan dan fenomena yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu obyek berifat menyeluruh, sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian terdapat batasan masalah yang disebut dengan fokus penelitian yang bertujuan untuk memberikan batasan terhadap fenomena atau permasalahan

yang sedang terjadi agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tidak meluas serta relevan dengan obyek yang sedang diteliti.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1) Implementasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Kota Surabaya

- a. Tujuan dan Sasaran Program
- b. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana.
- c. Sumber dan Alokasi Dana
- d. Penyiapan Kelembagaan/organisasi
- e. Pelaksanaan program di masyarakat

2) Dampak dari program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Kota Surabaya.

- a. Dampak terhadap perubahan sosial
- b. Dampak terhadap perubahan fisik
- c. Dampak terhadap perubahan ekonomi

3) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya.

a) Faktor Pendukung

- 1) Dana.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM).

b) Faktor Penghambat

- 1) Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat.
- 2) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Pengguliran Dana.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini lokasi ini yang dipilih adalah wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya, Kelurahan penerima program RSDK, Lembaga lokal dan masyarakat yang menerima program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menyangkut jenis data yang dapat memberikan dan mengungkapkan informasi tentang permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Berdasarkan jenis datanya, data dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk memperoleh data primer, peneliti mengambil sumber data dari Kantor Dinas Sosial, Lembaga lokal dan masyarakat penerima program.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh pengumpulnya, melainkan lewat dokumen-dokumen yang banyak memuat informasi yang bisa mendukung peneliti. Adapun sumber

data pendukung dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau literatur, Peraturan Perundang-undangan, pengalihan data dari internet serta dokumen-dokumen, pedoman pelaksanaan program RSDK yang ada pada Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1) Observasi

Teknik pengumpulan data dimana peneliti melihat secara visual sehingga data sangat tergantung pada kemampuan observer. Disini peneliti melakukan observasi terhadap program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya bagi masyarakat miskin.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan melakukan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat, lembaga lokal / UPKM, dan keluarga miskin penerima bantuan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan catatan dan rekaman yang menggunakan *tape recorder*.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen berupa:

- 1) Peneliti sendiri, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
- 2) Pedoman wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan responden untuk mencari informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai pemandu. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang dianggap perlu digunakan untuk mendapatkan informasi yang dianggap perlu digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti Ketua Seksi RSDK dan Penyandang Cacat, UPKM dan Masyarakat penerima bantuan.

- 3) Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan pikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan *tape recorder*, agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

G. Analisis Data

1. Analisa

Analisa dari data kualitatif secara khas adalah suatu proses yang interaktif dan aktif. Peneliti-peneliti kualitatif sering membaca data naratif mereka berulang-ulang dalam mencari arti dan pemahaman-pemahaman lebih dalam. Morse dan Field (<http://rahmiwati.net/analisis-data-kualitatif.html>) mencatat bahwa analisis kualitatif adalah proses tentang pencocokan data bersama-sama, bagaimana membuat yang samar menjadi nyata,

menghubungkan akibat dengan sebab, yang merupakan suatu proses verifikasi dan dugaan, koreksi dan modifikasi, usul dan pertahanan.

Beberapa kaum intelektual memainkan peran dalam analisis kualitatif.

Morse dan Field mengenali empat proses-proses :

a) Memahami

Awal proses analitik, peneliti-peneliti kualitatif berusaha untuk bisa mempertimbangkan data dan belajar mencari “apa yang terjadi”. Bila pemahaman dicapai, peneliti bisa menyiapkan cara deskripsi peristiwa, dan data baru tidak ditambahkan dalam uraian. Dengan kata lain pemahaman diselesaikan bila kejenuhan telah dicapai.

b) Sintesis

Sintesis meliputi penyaringan data dan menyatukannya. Pada langkah ini, peneliti mendapatkan pengertian dari apa yang “khas” mengenai suatu peristiwa dan apa variasi dan cakupannya. Pada akhir proses sintesis, peneliti dapat mulai membuat pernyataan umum tentang peristiwa mengenai peserta studi.

c) Teoritis

Meliputi sistem pemilihan data. Selama proses teoritis, peneliti mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan kemudian menjaga penjelasan ini sampai menentukan apakah “cocok” dengan data. Proses teoritis dilanjutkan untuk dikembangkan sampai yang terbaik dan penjelasan paling hemat diperoleh.

d) Recontextualisasi

Proses dari recontextualisasi meliputi pengembangan teori lebih lanjut dan aplikabilitas untuk kelompok lain yang diselidiki. Didalam pemeriksaan terakhir pengembangan teori, adalah teori harus generalisasi dan sesuai konteks.

2. Rencana Analisa

Rencana analisa sangat penting untuk menunjang kelancaran dalam penelitian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Morse dan Field analisa data yang akan diterapkan oleh peneliti yang pertama adalah dengan memahami dan mempelajari hal-hal dan peristiwa yang ada di lokasi penelitian, dalam hal ini peneliti akan mengawasi peristiwa apa saja yang ada di Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya. Setelah itu peneliti dapat mulai mengumpulkan data dan menyaringnya baik melalui wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat, Lembaga Lokal / UPKM, dan Keluarga Miskin penerima bantuan, maupun data dari hasil pengamatan dan dokumentasi, sehingga diperoleh data-data secara umum tentang peristiwa yang telah diamati peneliti. Data-data yang telah diperoleh mulai dipilah-pilah dan dikaitkan dengan teori yang ada sehingga diperoleh penjelasan yang baik. Setelah itu teori dan data yang diperoleh akan dikembangkan lagi menjadi lebih sederhana namun informative sehingga menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan kriteria untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut dinamakan “keabsahan data”. Guba dan Lincoln (dalam Muhadjir, 2000), mengemukakan bahwa untuk menetapkan “*trustworthiness*” (keabsahan data) dalam penelitian kualitatif diperlukan teknik pemeriksaan, yaitu :

- 1) Derajat Kepercayaan (*credibility*), fungsinya adalah untuk melaksanakan penyelidikan (*inquiry*) sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti. Derajat kepercayaan dapat dicapai lewat ketekunan pengamatan, perpanjangan partisipasi, melakukan triangulasi, memperbanyak referensi, dan mengkaji kasus negatif.
- 2) Keteralihan (*transferability*), merupakan validitas eksternal berdasarkan pada konteks empiris setting penelitian, yaitu tentang “emic” yang diterima peneliti dan “ethic” yang merupakan hasil interpretasi peneliti. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.
- 3) Kebergantungan (*dependability*), dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisa data agar derajat reabilitas dapat tercapai, maka diperlukan “audit” atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

- 4) Kepastian (*confirmability*), yaitu objektivitas yang berdasarkan pada “emic” dan “ethic” sebagai tradisi penelitian kualitatif. Derajat ini juga dapat dicapai melalui “audit” atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

Selama masa penelitian, peneliti akan berusaha untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh dari penelitian. Peneliti akan menerapkan triangulasi data pada saat penelitian, yaitu pengecekan data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Dalam hal ini peneliti akan memadukan data dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat dengan data dokumentasi berupa peraturan-peraturan, pedoman pelaksanaan, dan lembaga lokal serta masyarakat yang menerima bantuan. Selain itu peneliti akan berusaha menjaga keteralihan data dengan cara mencatat setiap informasi yang diterima dan juga menghindari subyektifitas data sehingga data yang diperoleh adalah murni.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

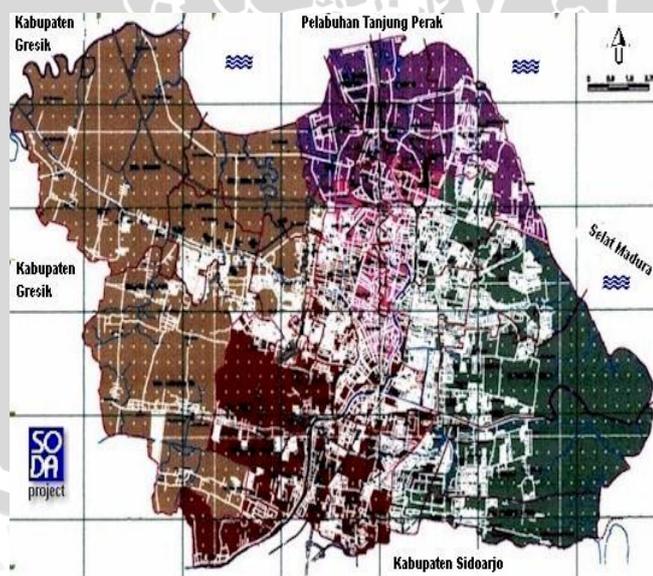
1. Gambaran Umum Kota Surabaya

1.1. Keadaan Geografis

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan ibukota Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Kota Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 33.306,30 Ha dan secara astronomi terletak diantara $07^{\circ} 9'$ s/d $07^{\circ} 21'$ LS (Lintang Selatan) dan $112^{\circ} 36'$ s/d $112^{\circ} 54'$ BT (Bujur Timur). Batas wilayah Surabaya dibagi atas 4 bagian wilayah, yaitu:

Gambar 1

Batas Wilayah Kota Surabaya



- Sebelah Utara : Selat Madura dan Kab. Bangkalan
- Sebelah Timur: Selat Madura

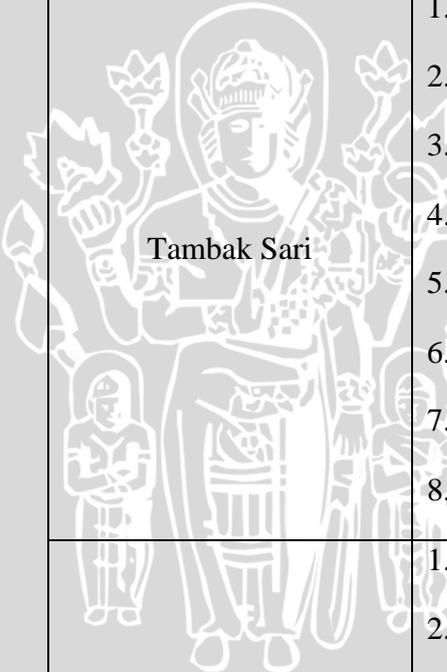
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Secara Administratif menurut Perda No.5 tahun 2011, wilayah Kota Surabaya dibagi kedalam 5 Wilayah Pembantu Walikota yang terdiri atas 31 Kecamatan dan 163 kelurahan.

Tabel 2
Pembagian Wilayah Kerja Pembantu Kota Surabaya

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
Surabaya Pusat	Tegal Sari	1. Dr.Soetomo 2. Kedungdoro 3. Keputran 4. Tegalsari 5. Wonorejo
	Simokerto	1. Kapasan 2. Sidodadi 3. Simokerto 4. Simolawang 5. Tambak Rejo

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
	Genteng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Embong Kaliasin 2. Genteng 3. Kapasari 4. Ketabang 5. Peneleh
	Bubutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alun-alun Contong 2. Bubutan 3. Gundih 4. Jepara 5. Tembok Dukuh
Surabaya Timur	Gubeng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Airlangga 2. Baratajaya 3. Gubeng 4. Kertajaya 5. Mojo 6. Pucang Sewu
	Gunung Anyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunung Anyar 2. Gunung Anyar Tambak 3. Rungkut Menanggal 4. Rungkut Tengah

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
	Sukolilo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebang Putih 2. Keputih 3. Klampis Ngasem 4. Medokan Semampir 5. Menur Pumpungan 6. Nginden Jangkungan 7. Semolowaru
	 <p>Tambak Sari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gading 2. Dukuh Setro 3. Kapas Madya 4. Pacarkeling 5. Pacarkembang 6. Ploso 7. Rangkah 8. Tambaksari
	Mulyorejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukuh Sutorejo 2. Kalijudan 3. Kalisari 4. Kejawan Putih Tambak 5. Manyar Sabrangan 6. Mulyorejo

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
	Rungkut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaliurang 2. Kedung Baruk 3. Medoan Ayu 4. Penjaringansari 5. Rungkut Kidul 6. Wonorejo
	Tenggilis Mejoyo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendangsari 2. Kutisari 3. Panjang Jiwo 4. Prapen 5. Tenggilis Mejoyo
Surabaya Barat	Benowo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kandangan 2. Klakalrejo 3. Romokalisari 4. Sememi 5. Tambak Oso Wilangun
	Pakal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babat Jerawat 2. Benowo 3. Pakal 4. Sumber Rojo 5. Tambak Dono

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
	Asem Rowo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asemrowo 2. Genting 3. Greges 4. Kalianak 5. Tambak Langon
	Sukomanunggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putat Gude 2. Simomulyo 3. Simomulyo Baru 4. Sonokwijen 5. Sukomanunggal 6. Tanjung Sari
	Tandes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balongsari 2. Banjar Sugihan 3. Karangpoh 4. Manukan Kulon 5. Manukan Wetan 6. Tandes
	Sambikerep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bringin 2. Lontar 3. Made 4. Sambikerep

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
	Lakarsantri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangkingan 2. Jeruk 3. Lakarsantri 4. Lidah Kulon 5. Lidah Wetan 6. Sumur Welut
	Bulak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulak 2. Kedung Cowek 3. Kenjeran 4. Komplek Kenjeran 5. Sukolilo
Surabaya Utara	Kenjeran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulak Banteng 2. Sidotopo Wetan 3. Tambak Wedi 4. Tanah Kali Kedinding
	Semampir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ampel 2. Pegirian 3. Sidotopo 4. Ujung 5. Wonokusumo

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
	Pabea Cantikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bongkaran 2. Krembangan Utara 3. Nyamplungan 4. Perak Timur 5. Perak Utara
	Krembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dupak 2. Kemayoran 3. Krembangan Selatan 4. Morokrembangan 5. Perak Barat
Surabaya Selatan	Wonokromo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darmo 2. Jagir 3. Ngagel 4. Ngagel Rejo 5. Sawunggaling 6. Wonokromo
	Wonocolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendul Merisi 2. Jemur Wonosari 3. Margorejo 4. Sidosermo 5. Siwalankerto

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
	Wiyung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babatan 2. Balas Klumprik 3. Jajar Tunggal 4. Wiyung
	Karang Pilang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karangpilang 2. Kebraon 3. Kedurus 4. Waru Gunung
	Jambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jambangan 2. Karah 3. Kebonsari 4. Pagesangan
	Gayungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukuh Menanggal 2. Gayungan 3. Ketintang 4. Menanggal
	Dukuh pakis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukuh Kupang 2. Dukuh Pakis 3. Gunung Sari 4. Pradah Kali Kendal

WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
	Sawahan	1. Banyu Urip 2. Kupang Krajan 3. Pakis 4. Petemon 5. Putat Jaya 6. Sawahan

Sumber : Data Pemerintah Kota Surabaya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di wilayah Surabaya Pusat terdapat 4 Kecamatan, dan 20 Kelurahan, di wilayah Surabaya bagian Timur terdapat 7 Kecamatan dan 42 Kelurahan. Sedangkan di wilayah Surabaya Barat terdapat 7 Kecamatan dan 37 Kelurahan, di wilayah Surabaya Utara terdapat 5 Kecamatan dan 24 Kelurahan. Dan di wilayah Surabaya Selatan terdapat 8 Kecamatan dan 40 Kelurahan.

Secara topografi Kota Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80% dengan ketinggian 3-6 m diatas permukaan air laut, dengan kemiringan < 3%, sedangkan 20% merupakan perbukitan dengan gelombang rendah dengan ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15%. Kelembapan udara kota Surabaya rata-rata minimum 50% dan maksimum 92%, sedangkan tekanan udara rata-rata minimum 1012,3 Mbs dan maksimum 1012,5 Mbs. Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 165,3 mm dan maksimum 200 mm terjadi pada bulan Januari s/d Maret dan Nopember s/d Desember dengan temperature rata-rata minimum 23,6 °C dan maksimum 33,8 °C. Jenis batuan yang ada terdiri dari 4

jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah aluvial, selebihnya tanag dengan kadar kapur yang tinggi di daerah perbukitan.

1.2. Keadaan Demografi

Kota Surabaya berkembang sebagai Kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis. Menjadi pusat aktivitas sama artinya menjadi jujugan bagi orang dari berbagai daerah. Jumlah penduduk jelas akan semakin meningkat seiring pesona Kota Surabaya yang menjanjikan segala macam kemudahan. Maka tantangan besar berikutnya ialah menyiapkan kehidupan yang layak. Kota Surabaya haruslah tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi penghuninya.

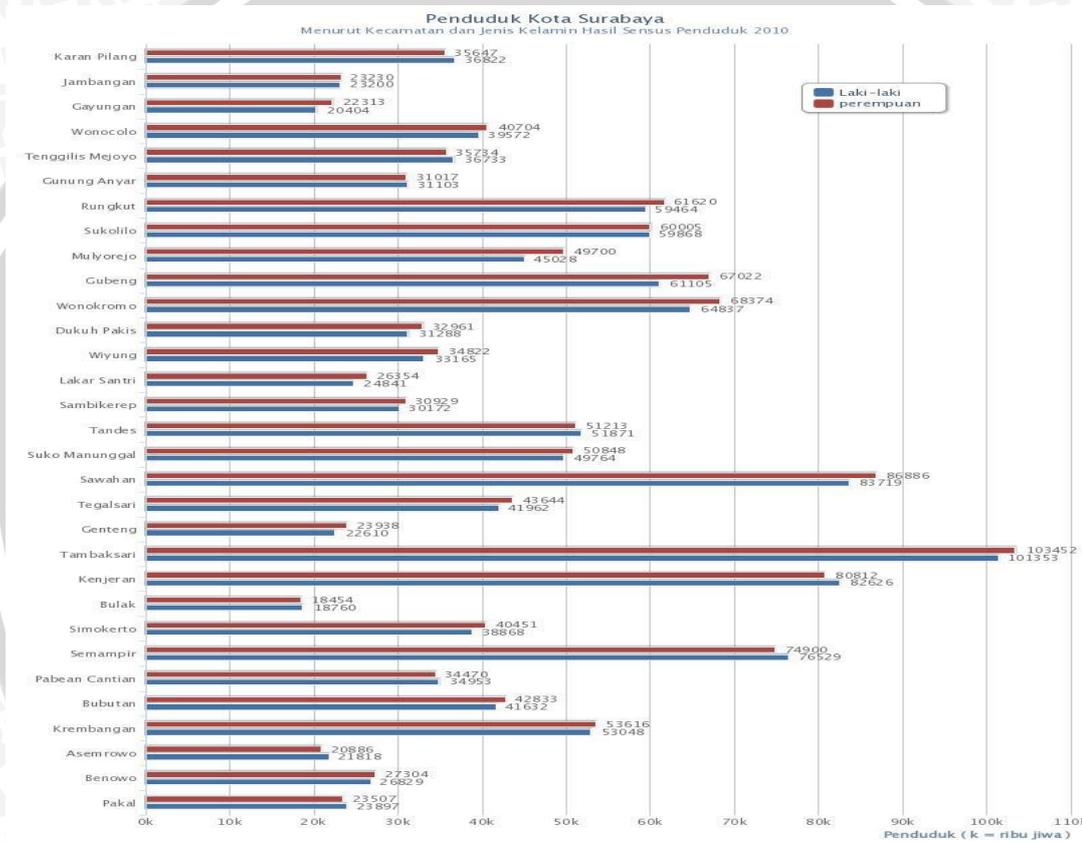
Selain sebagai Kota Metropolitan, Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab dan Eropa. Etnis Nusabtera pun dapat dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralism budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura. Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya sangat terbuka. Walaupun tampak seperti bertemperamen kasar, masyarakat Surabaya sangat demokratis, toleran dan senang menolong orang lain.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai sebesar 2.765.487 orang dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010, dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 49%



dan perempuan sebesar 51%. Penduduk Kota Surabaya bila dilihat per kecamatan jumlahnya sangat bervariasi.

Gambar 2
Penduduk Kota Surabaya Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin



Sumber : BPS Kota Surabaya tahun 2012

Dapat dilihat dari gambar diatas penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tambaksari yaitu sebanyak 204.205 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 101.353 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 103.452 jiwa. Sementara kecamatan Bulak yaitu sebanyak 37.214 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 18.760 orang dan penduduk perempuan sebanyak

18.454 orang. Rendahnya jumlah penduduk di Kecamatan Bulak dibandingkan dengan kecamatan lain di Surabaya diduga karena Kecamatan Bulak merupakan wilayah pemukiman baru yang lahannya masih berupa tambak. Selain dilihat dari aspek jenis kelamin dapat dilihat pula dari distribusi kelompok umur penduduk Kota Surabaya Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 jumlahnya bervariasi.

Gambar 3
Piramida Penduduk Kota Surabaya



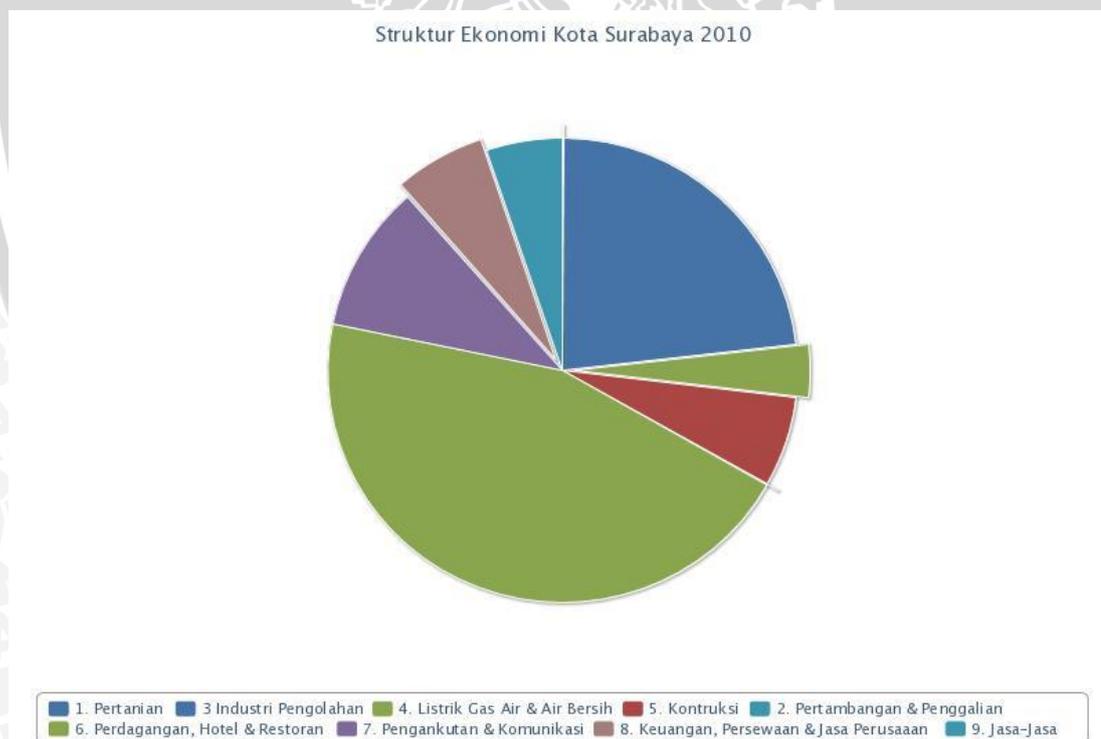
Sumber : BPS Kota Surabaya tahun 2010

Jumlah penduduk paling banyak berada pada rentang usia 25-29 tahun yaitu sebesar 293.084 jiwa dengan rincian 145.605 jiwa penduduk laki-laki dan 147.479 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan, jumlah penduduk paling sedikit berada pada rentang usia 95+ yaitu sebanyak 1.995 jiwa dengan rincian 824 jiwa penduduk laki-laki dan 1.171 jiwa penduduk perempuan.

1.3. Struktur Ekonomi

Kondisi ekonomi kota Surabaya dapat dilihat dari perkembangan perekonomian yang dimana dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Semakin besar nilai tambah bruto maka semakin besar nilai keberhasilan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari gambar grafik berikut :

Gambar 4
Struktur Ekonomi Kota Surabaya



Sumber : BPS Kota Surabaya Tahun 2010

Berdasarkan data BPS Surabaya tahun 2010, Struktur ekonomi kota Surabaya masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini sangat wajar karena Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur dan merupakan pusat perdagangan, dan bisnis di wilayah timur Indonesia. Dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sektor primer, sekunder, dan tersier di kota Surabaya sangat mendukung untuk semakin memperkokoh sebutan Surabaya sebagai kota perdagangan dan ekonomi.

2. Profil Dinas sosial kota Surabaya

2.1. Perkembangan Dinas Sosial Kota Surabaya

Dinas Sosial Kota Surabaya terbentuk sejak tahun 2001. Awalnya, Dinas Sosial merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Surabaya yang dikenal dengan Bagian Sosial. Kemudian dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada Pemerintah Kota Surabaya dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan daerah, maka Pemerintah Kota Surabaya merasa perlu mengatur kembali Organisasi Dinas Kota Surabaya. Untuk tujuan itulah Pemerintah menetapkan Perda no 3 tahun 2001 Tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya. Dalam Perda tersebut, pemerintah menetapkan pembentukan Dinas-Dinas di Kota Surabaya yang terdiri dari 23 Dinas, termasuk didalamnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan merupakan hasil peleburan dari Bagian Sosial dan dengan Cabang

Dinas Sosial yang merupakan Instansi Vertikal Pemerintahan Kota. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan yang meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan. Lebih lanjut Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan diatur dalam Peraturan Walikota No 58 tahun 2001 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya.

Dengan adanya Perkembangan Penataan Pemerintah Daerah, dan untuk menindaklanjuti Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 tahun 2005, Pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Daerah No 14 tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya. Peraturan ini mengatur kembali Dinas-Dinas di Kota Surabaya, salah satunya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dirampingkan menjadi Dinas Sosial. Sedangkan, Pemberdayaan Perempuan melebur dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi. Secara rinci Tugas dan Fungsi Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Walikota no 63 tahun 2005 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan Pemerintahan Kota, ada penyempurnaan dalam organisasi Dinas

Sosial yang kemudian Tugas dan Tanggung Jawabnya diatur dalam Keputusan Walikota no 91 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

2.2. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Surabaya

a) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Sosial.
- 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Sosial.
- 4) Pengelolaan ketatausahaan Dinas.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Visi dan Misi.

1) Visi

Mencerna dan memahami makna visi Kepala Daerah untuk menjadikan kota Surabaya Cerdas dan Peduli maka Visi Dinas Sosial Kota Surabaya adalah :

“Fasilitator Terdepan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”

Visi ini mempunyai arti bahwa sebagai fasilitator dituntut untuk mampu memberikan akses dan kemudahan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, rehabilitasi, dan perlindungan sosial yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraannya.

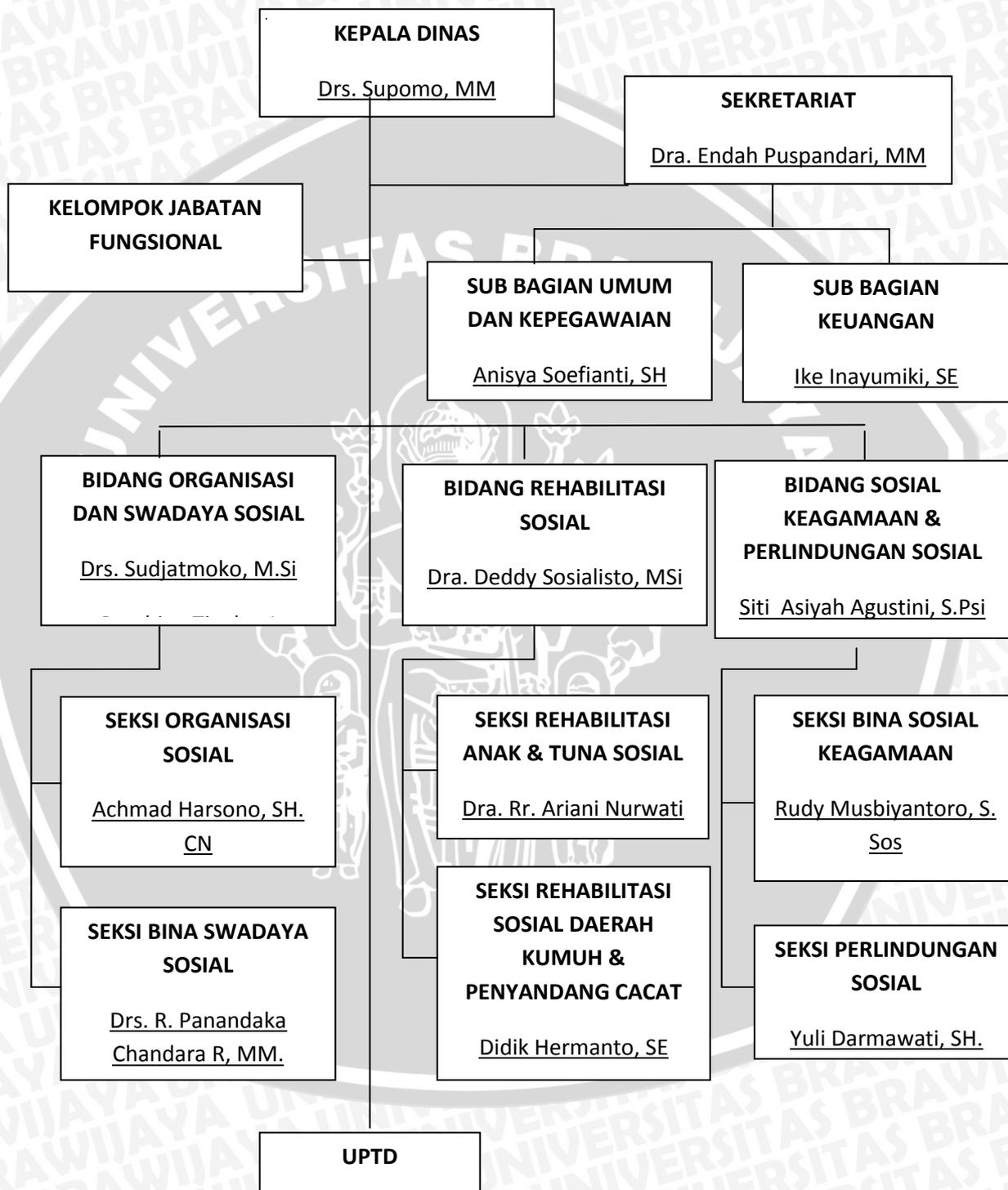
2) Misi

Untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pelayanan sosial di Kota Surabaya, maka misi yang akan dijalankan:

- a) Meningkatkan kinerja dinas.
- b) Meningkatkan kualitas layanan publik, didukung oleh sistem dan prosedur yang pasti.
- c) Mewujudkan kerukunan hidup beragama, multikultur dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
- d) Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat.

2.3. Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya

Gambar 5
Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya



Sumber : Data Profil Dinas Sosial



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 tahun 2004 Tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya mempunyai struktur/perangkat organisasi yang terdiri atas 3 (tiga) bidang, kelompok jabatan fungsional dan secretariat dengan uraian sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Organisasi dan Swadaya Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Organisasi Sosial;
 - 2) Seksi Bina Swadaya Sosial
- e) Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat;
- f) Bidang Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Bima Sosial Keagamaan;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial;
- g) UPTD

2.4. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Surabaya

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tentu saja harus didukung dengan program yang mampu memberikan dorongan sebagai langkah utama dalam melaksanakan tanggung jawab tugas yang menjadi kewenangan Dinas Sosial. Adapun program yang digunakan sebagai dasar kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a) Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - 1) Bantuan Stimulan untuk PACA (Tuna Netra, Rungu, Daksa, dan Grahita)
 - 2) Bimbingan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Jalanan.
 - 3) Bimbingan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bagi Eks NAPZA.
 - 4) Bimbingan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bagi ODHA.
 - 5) Bimbingan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bagi WTS (Tata Boga dan Handycraft).
 - 6) Bimbingan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Korban Trafficking.
 - 7) Bimbingan ESQ/ Perubahan Perilaku Bagi PMKS (Anak Jalanan dan WTS)
 - 8) Bimbingan Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat.
 - 9) Bimbingan Sosial dan Pelatihan Usaha Bagi PACA (Tuna Netra, Rungu, Daksa dan Grahita)
 - 10) Pemulangan ke Daerah Asal Bagi Orang Terlantar.

- 11) Penertiban Terpadu Bagi PMKS Jalanan.
- 12) Penjaringan / Penjangkauan Anak Jalanan.
- 13) Penjemputan PMKS Terlantar.
- 14) Penyaluran PMKS ke Panti Sosial Provinsi Jawa Timur.
- 15) Survey dan Pelaporan.

b) Pelepasan Jamaah Calon Haji Kota Surabaya

- 1) Pelaksanaan Pelepasan Jamaah Calon Haji

c) Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.

- 1) Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- 2) Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Baru.
- 3) Pendampingan.
- 4) Pengenalan Program RSDK.
- 5) Perbaikan Rumah Keluarga Berumah Tak Layak Huni.
- 6) Stimulan Modal Peralatan Kerja Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

d) Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial

- 1) Bimbingan Manajemen Pengurus Organisasi.
- 2) Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial (Panti Asuhan/Pondok Sosial)

- 3) Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
 - 4) Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).
 - 5) Pembinaan Kepada Lembaga Sosial.
 - 6) Pemilihan Lembaga Sosial Berprestasi.
- e) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
- 1) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
 - 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
 - 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - 5) Tambah Daya Aliran Listrik.
- f) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)
- 1) Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah
 - 2) Pemberian Penghargaan Bagi Warakawuri.
 - 3) Pemeliharaan MPN.
 - 4) Pemeliharaan TMP.
 - 5) Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong.
 - 6) Pengadaan Papan Nama Batu Nisan TMP dan MPN.
 - 7) Petugas Lapangan Makam.
 - 8) Ramah Tamah Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan.
 - 9) Sarasehan Nilai-nilai Kepahlawanan.

g) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

- 1) Diseminasi Peraturan-peraturan dan kebijakan Kesejahteraan Sosial (Penyuluhan, Seminar, Diskusi, dan Lokakarya)
- 2) Gelar Karya Warga Binaan.
- 3) Pelatihan Teknik Pendampingan Penanganan PMKS (Concelin, Assesman, Advokasi)
- 4) Pemilihan Kader Masyarakat (Social Award)
- 5) Sosialisasi Melalui Jejaring Sosial.

h) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPT Pondok Sosial Kalijudan

- 1) Bimbingan Kesenian
- 2) Bimbingan Ketrampilan Komputer
- 3) Bimbingan Ketrampilan OR dan OM
- 4) Bimbingan Les Bahasa Inggris
- 5) Bimbingan Mental Fisik dan Budi Pekerti
- 6) Bimbingan Sosial dan Ketrampilan di dalam dan di luar panti
- 7) Pemeliharaan di UPTD Pondok Sosial Kalijudan
- 8) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Permakaman Bagi Penghuni UPT Pondok Sosial Kalijudan.
- 9) Pengadaan Perlengkapan Penghuni dan Personil UPT Pondok Sosial Kalijudan.
- 10) Pengasramaan Murid Anak luar biasa bagi keluarga tidak mampu

- 11) Penyediaan alat rumah tangga UPT Pondok Sosial Kalijudan
- 12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Surat Kabar UPT Pondok Sosial Kalijudan
- 13) Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Pondok Sosial Kalijudan
- 14) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pondok Sosial Kalijudan.

i) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat.

- 1) Bimbingan Ketrampilan Keset Sabut
- 2) Bimbingan Ketrampilan Pembuatan Pertamanan
- 3) Bimbingan Mental Sosial Rohani Bagi Penderita Eks Kusta Panti (Islam, Kristen, Katolik)
- 4) Bimbingan Pembuatan Sulak Rafia
- 5) Bimbingan Sosial Psikologis
- 6) Pemasangan Jaringan PDAM
- 7) Pemeliharaan di UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat
- 8) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Permakaman Bagi Penghuni
- 9) Pengadaan Perlengkapan Penghuni dan Personil UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat
- 10) Penyedia Alat Rumah Tangga UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat

11) Penyedia Jasa dan Pelayanan Bagi UPT Lingkungan Sosial Kusta

Babat Jerawat

12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Surat

Kabar UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat

13) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Lingkungan Sosial

Kusta Babat Jerawat

j) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Anak

Wonorejo

1) Bimbingan Calistung (Membaca, Menulis dan Berhitung)

2) Bimbingan Ketrampilan Komputer

3) Bimbingan Ketrampilan Montir

4) Bimbingan Ketrampilan Pembuatan Sandal

5) Bimbingan Ketrampilan Potong Rambut

6) Bimbingan Mental Fisik dan Budi Pekerti

7) Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Sablon

8) Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar

9) Pemeliharaan di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo

10) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Permakanaan Bagi Penghuni UPT

Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo

11) Pengadaan Perlengkapan Olahraga dan Kesenian

12) Pengadaan Perlengkapan Penghuni dan Personil UPT Panti

Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo

13) Penyediaan Alat Rumah Tangga UPT Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo

14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Surat Kabar UPT Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo

15) Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo

16) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo

17) Praktek Belajar Kerja

k) Peningkatkan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih

1) Biaya Pemakaman untuk Penghuni UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih yang meninggal

2) Bimbingan Ketrampilan Handycraft Bagi Binaan LIPONSOS Keputih

3) Bimbingan Mental Sosial Rohani Bagi GEPENG, Psikotik dan LANSIA Panti (Islam, Kristen, Katolik)

4) Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Pertukangan Kayu/ Meubelair Bagi Binaan LIPONSOS Keputih

5) Bimbingan Sosial dan Pelatihan Songkok/ Kopyah Bagi Binaan LIPONSOS Keputih

- 6) Bimbingan Sosial dan Pertanian (Kebun dan Perikanan) Bagi Binaan LIPONSOS Keputih
- 7) Pemeliharaan di UPD Panti Rehabilitasi Sosial Keputih
- 8) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Permakanan Bagi Penghuni UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih
- 9) Pemulangan Hasil Razia pada Keluarga melalui Kecamatan Setempat (Surabaya)
- 10) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih
- 11) Pengadaan Perlengkapan Penghuni dan Personil UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih
- 12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Surat
- 13) Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih
- 14) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih
- 1) Peningkatan Pembinaan, Pelayanan, dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia
 - 1) Bimbingan Kesenian Bagi Lanjut Usia (Olahraga dan Kreasi)
 - 2) Bimbingan Ketrampilan Daur Ulang Sampah Bagi Lanjut Usia
 - 3) Bimbingan Ketrampilan Pembuatan Jamu Instan, Minuman Saridele, dan Sirup bagi lansia
 - 4) Fasilitasi Kegiatan Lanjut Usia di 5 wilayah Surabaya
 - 5) Lomba Gerak Jalan Bagi Lanjut Usia Tingkat Karang Werda

- 6) Lomba Paduan Suara Bagi Lanjut Usia Tingkat Karang Werda
 - 7) Lomba Senam Bagi Lanjut Usia Tingkat Karang Werda
 - 8) Pelatihan Senam Bagi Lanjut Usia
 - 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Lanjut Usia
- m) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- 1) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
 - 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan/
Kantor
 - 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- n) Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa
- 1) Bantuan Makanan Kesiapsiagaan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana/ Musibah Lainnya
 - 2) Identifikasi dan Evakuasi Korban Bencana
 - 3) Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Center Termasuk Bagi Korban Bencana

- 4) Pemantapan SATGASSOS PBP Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- 5) Pemantapan TAGANA Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- 6) Penyediaan Sarana Prasarana Bencana
 - o) Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial atau Organisasi Sosial
 - 1) Monitoring dan Survey
 - 2) Pengadaan Kebutuhan Dasar (Sembako) Kepada Panti Sosial atau Organisasi Sosial
 - p) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
 - 1) Bimbingan dan Pembinaan Modim
 - 2) Do'a Bersama Umat Beragama (Islam, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu)
 - 3) Fasilitasi Pembinaan Mental Agama di Lokalisasi
 - 4) Fasilitasi Pembinaan Pra Perkawinan Bagi Umat Beragama (Islam, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu)
 - 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Karya Bhakti Pekerja Sosial Keagamaan dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau Panti Tingkat Kecamatan
- 6) Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi dan Pengiriman Kafilah STQ Tingkat Provinsi atau Nasional
- 7) MTQ Kota Surabaya
- 8) Operasional Kegiatan (Insentif Modin)

- 9) Pembinaan Umat Beragama atau Ulama-umaro
 - 10) Pendampingan Mental Agama Bagi Korban Pasca Bencana Alam
 - 11) Pengadaan Keranda Kematian (Sinoman)
 - 12) Pengajian agama atau Tausiyah
 - 13) Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu)
 - 14) Tabligh Akbar atau Dzikir Bersama
- q) Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 1) Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 2) Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS
 - 3) Pengembangan Software
 - 4) Rapat Kerja Program Bidang Kesejahteraan Sosial

B. Penyajian Data dan Fokus

1. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya

Program RSDK di kota Surabaya ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2003 oleh Dinas Sosial. Program ini pada tahun 2003 masih mengacu pada petunjuk pelaksana Dinas Sosial. Namun dengan semakin besar pertanggung jawaban dan perkembangan program RSDK ini sehingga diperlukan acuan secara hukum dengan mengeluarkan Perwali no 19 tahun 2010 yang kemudian disempurnakan

dengan Perwali no 33 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Program RSDK ini dilakukan secara terpadu baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat perkampungan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada pelaksanaan program RSDK tahun 2011. Pada tahun 2011 jumlah penerima bantuan sebanyak 21 Kelurahan pada 14 Kecamatan.

Tabel 3
Lokasi Implementasi Program RSDK Tahun 2011

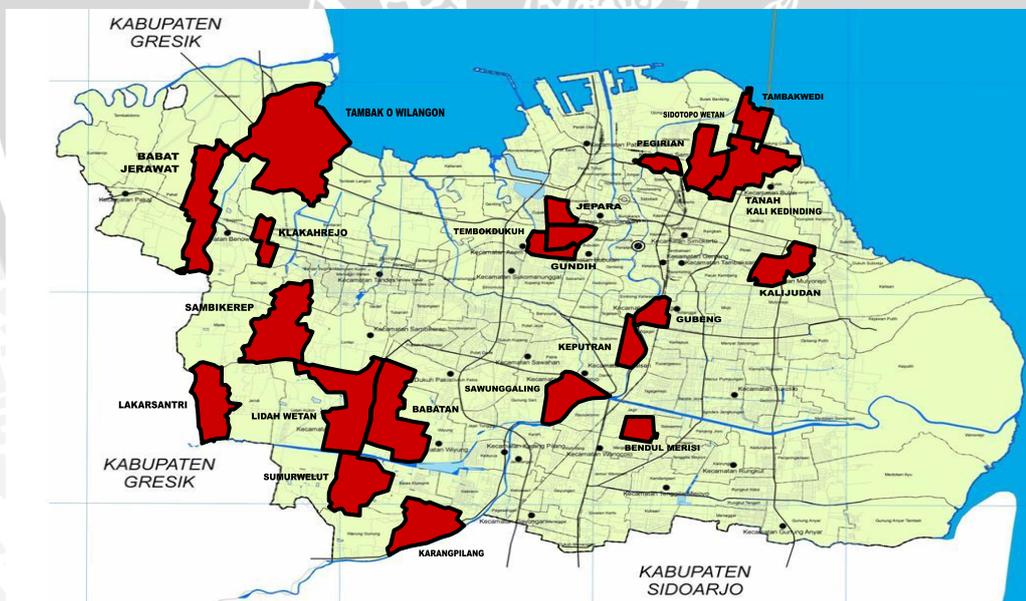
KECAMATAN		KELURAHAN	
1	Karangpilang	1	Karangpilang
2	Lakarsantri	2	Lakarsantri
		3	Lidah Wetan
		4	Sumur Welut
3	Benowo	5	Klakahrejo
		6	Tambak Oso Wilangan
4	Bubutan	7	Gundih
		8	Jebara
		9	Tembokdukuh
5	Gubeng	10	Gubeng
6	Kenjeran	11	Sidotopo Wetan
		12	Tambak Wedi
		13	Tanah Kali Kedinding

7	Mulyorejo	14	Kalijudan
8	Sambikerep	15	Sambikerep
9	Semampir	16	Pegirian
10	Tegalsari	17	Keputran
11	Wiyung	18	Babatan
12	Wonocolo	19	Bendul Merisi
13	Wonokromo	20	Sawung Galing
14	Pakal	21	Babat Jerawat

Sumber : Laporan Kegiatan Program RSDK tahun 2011

Gambar 6

Sebaran Lokasi Implementasi Program RSDK tahun 2011



Sumber : Laporan Pelaksanaan Program RSDK tahun 2011

Dari 21 kelurahan yang menerima bantuan, peneliti melakukan penelitian kepada kelurahan di kawasan utara Kota Surabaya tepatnya pada kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Tambak Wedi, karena kawasan utara kota Surabaya merupakan kawasan kumuh dengan tingkat yang lebih tinggi di bandingkan dengan kawasan lainnya. Hal ini disebabkan karena tingginya kaum urban yang bertempat tinggal di daerah Utara Surabaya. Kaum urban tersebut hidup berkelompok membentuk suatu komunitas. Mereka menempati rumah-rumah yang padat penduduk di perkampungan kecil sehingga menciptakan lingkungan kumuh yang tidak layak huni. Namun sebagai pembanding dari kelurahan yang ada di daerah Utara Surabaya, peneliti juga meneliti di kawasan Timur Kota Surabaya yaitu pada kelurahan Kalijudan, hal ini dikarenakan letak dari kelurahan Kalijudan tidak jauh dari kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Tambak Wedi yang dimana juga merupakan daerah yang padat penduduk kaum urban.

a. Tujuan dan Sasaran Program

RSDK, diimplementasikan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tujuan dari program RSDK kota Surabaya yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

- 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
- 3) Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya.
- 4) Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“Rehabilitasi sosial daerah kumuh bukan mengacu pada fisik tapi justru pada mengubah fungsi sosial, dari keluarga miskin. Memang untuk pancangan itu kita memberikan bantuan rehabilitasi perbaikan rumah, tapi justru mindset yang kita digunakan adalah dengan merehabilitasi rumahnya, kita mengubah fungsi sosial, karena didalam depertemen sosial, orang kluarga miskin itu merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS ada beberapa macam salah satunya keluarga miskin, ada yang gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Dan keluarga miskin ini adalah ingin kita mengubah fungsi sosial masyarakat keluarga miskin seperti keluarga miskin yang kehilangan fungsi sosialnya. Salah satunya orang miskin biasanya minta-minta hanya menunggu bantuan pemerintah, tapi tidak ada upaya untuk mengembalikan apa yang dia pinjam. Lah fungsi-fungsi ini yang kita perbaiki dari fungsi sosial. Kemudian dari fungsi fisiknya yang dimana keluarga miskin selalu tinggal di daerah kumuh, kita mengubah mereka dengan memberikan rehabilitasi rumah kumuh untuk diperbaiki, kemudian setelah baik kita mengajarkan mereka untuk mengembalikan apa yang dia pakai, ini sudah diatur di perwali no 33” (hasil wawancara 26 November 2012 pukul 10.30 WIB).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh ini adalah untuk memperbaiki kondisi sosial

yang ada dimasyarakat dengan memberdayakan masyarakat secara langsung untuk bertanggung jawab dalam menggulirkan dana sehingga dapat disalurkan kembali kepada keluarga miskin lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan tujuan Program RSDK ini maka dalam implementasinya diperlukan sasaran penerima bantuan. Kelompok sasaran (*target group*) program adalah warga kampung dengan kategori keluarga miskin diman penyusunan rencana kegiatan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarahkan oleh warga/masyarakat kampung itu sendiri. Sehingga diperlukan kriteria sasaran program agar tepat sasaran. Kriteria sasaran program RSDK tahun 2011 sebagai berikut :

a) Kriteria Umum :

1. Keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Miskin.
(dibuktikan dengan surat keterangan Keluarga Miskin dari Kelurahan)
2. Kepala Keluarga merupakan Penduduk Kota Surabaya (Kelurahan Setempat).
(dibuktikan dengan KTP Kota Surabaya)
3. Kepala Keluarga berusia produktif, antara 18-55 tahun.
(dibuktikan dengan KTP Kota Surabaya)
4. Kondisi rumahnya tidak layak huni.
(disertai dengan foto dan Surat Keterangan dari Kelurahan)
5. Isteri/suami/anggota keluarga serumah, bersedia untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan usaha dari pelatihan.
(disertai dengan Surat pernyataan dari Suami dan Isteri)

6. Bersedia untuk membayar angsuran pinjaman.
(disertai dengan Surat pernyataan dari Suami dan Isteri)
7. Mendapatkan rekomendasi dari RT dan RW setempat.
8. Rumah tidak pada kondisi sengketa/ bermasalah/ legal.

b) Sasaran Khusus

1. Keluarga Miskin dengan Kepala Keluarga mengidap penyakit TB diberikan bantuan perbaikan rumah (setiap kelurahan 5 KK) dengan ketentuan khusus.
(disertai dengan surat keterangan kesehatan dari puskesmas setempat).

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“Dimana sasaran RSDK ini yang pertama di utamakan untuk warga asli Surabaya dan berdomisili di kelurahan setempat dan tanah yang ditempati bukan tanah sengketa dan harus ada surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan. nah yg kedua untuk kluarga miskin penyandang penyakit TBC, mereka tidak diwajibkan untuk mengembalikan penggulirannya, biasanya mereka diberikan surat keterangan dr dokter.”

Jadi sasaran program RSDK ini pada umumnya diutamakan bagi keluarga miskin yang berdomisili asli di kelurahan tersebut dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dengan kepemilikan tanah tidak dalam kondisi sengketa atau bermasalah serta kondisi rumah yang tidak layak huni. Selain itu bersedia untuk membayar pinjaman dana perbaikan rumah agar dapat digulirkan kepada keluarga miskin lainnya. Adapun jumlah target sasaran output dari program RSDK tahun 2011 adalah :

- a) 420 Keluarga Miskin (tergabung dalam 42 Kelompok Usaha Bersama) tiap kelurahan 20 kk
- b) 420 Rumah tidak layak huni. Tiap keluraham 20 unit rumah
- c) 21 lembaga UPKM, tiap keluraham 1 unit UPKM

b. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan–kegiatan pelaksana

1. Komunikasi antar organisasi terkait.

Komunikasi merupakan faktor yang penting bagi pencapaian tujuan suatu program. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan dan maksud yang disampaikan diterima oleh penerima. Program RSDK akan berjalan dengan baik apabila ada komunikasi yang berkesinambungan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lokal. Dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) pola komunikasi antar organisasi terkait menggunakan arah komunikasi dari bawah ke atas yang dimana alur informasi berasal dari lembaga lokal di masyarakat yang disebut UPKM ke Dinas Sosial. Hal ini berkaitan dengan program RSDK yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up* dimana pelaksanaan kegiatan dilapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Untuk memperlancar komunikasi antar instansi pelaksana maka diperlukan adanya evaluasi atau pelaporan atas program RSDK. Dengan melalui hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“Didalam Program RSDK ini, dibentuk suatu lembaga lokal yang disebut Unit Pembinaan Keluarga Miskin yang disebut UPKM. UPKM sendiri dibentuk dari musyawarah kelurahan setempat. UPKM disini tugasnya mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program RSDK di tiap kelurahannya masing-masing. Pada periode pertama atau tahun pertama nanti UPKM memberikan laporan evaluasi periode pertama pada saat lokakarya pertanggungjawaban. Setelah itu saat periode ke 2 dan ke 3 nantinya setiap UPKM memberikan laporan per 3 bulan kepada warga dan kelurahan secara keseluruhan mengenai pelaksanaan dan pengguliran dana, nanti dari pihak kelurahan melaporkan kepada tim pendamping dan dari tim pendamping baru dilaporkan ke Dinas. Ini dilakukan sampai tiga tahun masa aktif UPKM itu”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan program RSDK ini masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program ini. Sehingga keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Dengan dibentuknya lembaga lokal yang disebut UPKM yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan keluarga miskin, khususnya pada kegiatan program RSDK ini dapat memperlancar pelaksanaan program dilapangan. Namun tidak hanya dibutuhkan komunikasi dari masyarakat tetapi dibutuhkan pula komunikasi yang baik antara tim konsultan dan pendamping dengan masyarakat dan Dinas Sosial.

2. Kegiatan-kegiatan pelaksana

Pelaksanaan program RSDK di kota Surabaya merupakan salah satu upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial masyarakat di kota Surabaya, dimana penanganannya dilakukan secara terpadu baik dalam hal perbaikan fisik, lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Sehingga didalam pelaksanaan program RSDK terdapat komponen atau kegiatan-kegiatan. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 4

Kegiatan dan Bentuk Bantuan Program

	KEGIATAN	Perincian	Bentuk bantuan	Jmlh/kel	Total
1	Penyiapan kelembagaan upkm	Pembentukan/penguatan	Kelengkapan kerja	1 unit	21 unit
2	Pelatihan keterampilan	Usaha kerajinan tangan	Stimulan peralatan kerja	20 KK	420 KK
		Usaha tataboga	Stimulan peralatan kerja		
3	Perbaikan rumah	Perbaikan atap	Bahan bangunan dan pekerjaan perbaikan rumah (dengan nilan @5 juta)	20 unit rumah	420 unit rumah

Sumber : Laporan Kegiatan Program RSDK tahun 2011

Adapun komponen utama program RSDK yang diimplementasikan di lingkungan perumahan kampung terdiri dari :

a) Kegiatan Penyiapan Kelembagaan program di masyarakat

Untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial pada masing-masing kampung dilakukan penyiapan suatu lembaga lokal yaitu UPKM, baik berupa penguatan terhadap lembaga yang ada atau pembentukan lembaga baru. Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada warga (melalui forum musyawarah Rukun Warga) dan kepada Pemerintah Daerah (melalui Kelurahan dan Dinas Sosial) mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kegiatan dan secara berkelanjutan. Pola pembentukan kelembagaan lokal harus berdasarkan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat. Untuk menunjang kelancaran kegiatan kerja, UPKM mendapatkan bantuan stimulant peralatan kerja dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, sesuai dengan ketersediaan anggaran.

b) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha

Untuk mendorong munculnya kemandirian keluarga dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan keterampilan usaha yang bisa digunakan sebagai modal guna menumbuhkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan keluarga. Pelatihan Usaha diberikan kepada keluarga miskin anggota KUBE, yang memiliki minat untuk memulai atau mengembangkan usaha. KUBE adalah gabungan perorangan atau keluarga yang menjalankan kegiatan bersama, baik usaha ekonomi dan sosial guna meningkatkan kesejahteraannya. Jenis pelatihan yang diberikan, pada prinsipnya memperhatikan minat, potensi dan kemampuan keluarga dan/atau masyarakat setempat. Pembimbingan usaha

kepada keluarga miskin dan/atau KUBE secara awal dilakukan oleh UPKM dan dapat dibantu oleh institusi dunia usaha yang terkait.

Secara bertahap diharapkan muncul pembinaan berkelanjutan dalam kemasan yang bersifat profesional yang diberikan oleh instansi Pemerintah maupun swasta yang bergerak di dunia usaha dan industri. Untuk menunjang kelancaran upaya penumbuhan kegiatan usaha, kelompok keluarga miskin peserta pelatihan mendapatkan bantuan stimulant peralatan kerja dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, sesuai dengan ketersediaann anggaran.

c) Kegiatan Perbaikan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, bukan semata-mata kegiatan yang berorientasi fisik, melainkan merupakan satu kesatuan dengan aspek sosial ekonomi yang berorientasi pada kerangka pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni, diberikan kepada keluarga miskin yang prasarana lingkungan dan/atau bangunan rumahnya mendapatkan prioritas untuk segera diperbaiki, dengan memperhatikan kondisi fisik rumah, gangguan yang dialami keluarga akibat kondisi rumah tidak layak huni dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Jenis komponen bangunan rumah yang diperbaiki, terdiri dari :

1. Perbaikan atap
2. Perbaikan dinding
3. Perbaikan lantai
4. Perbaikan komponen bangunan rumah lainnya.

c. Sumber dan Alokasi Dana

Dalam implementasi suatu program tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, bahan dan perlengkapan, namun masalah yang sering menghambat implementasi program dan proyek adalah masalah biaya. Sumber pembiayaan dari pelaksanaan program RSDK ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang dimana tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial. Untuk memberi kesempatan pada peran serta warga masyarakat dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan maka mobilisasi dana swadaya masyarakat dimungkinkan dilakukan secara koordinatif dengan pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan.

Secara umum pengalokasian dan pemanfaatan dana untuk tiap kelurahan pada kegiatan program RSDK Kota Surabaya, terdiri dari kegiatan pelatihan usaha dan kegiatan perbaikan rumah, untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dan keberlanjutan program RSDK, dilaksanakan pula kegiatan pembentukan dan/atau penguatan lembaga UPKM dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pelatihan usaha

Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama dan tiap peserta atau kelompok akan mendapatkan stimulant kelengkapan usaha, bukan dana modal usaha. Pelatihan yang diberikan kepada warga adalah pelatihan yang sesuai dengan minat usahanya atau kegiatan usaha yang cocok untuk dikembangkan di wilayah setempat.

- 2) Kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah.

Nilai dana program yang diimplementasikan untuk kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah, disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial.

3) Kegiatan pembentukan dan/atau penguatan UPKM.

Pada kegiatan pembentukan dan/atau penguatan lembaga UPKM, setiap lembaga tersebut akan mendapatkan bantuan stimulant peralatan kerja, sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“Sumber dana untuk program RSDK ini dari APBD Kota Surabaya, untuk APBD tahun 2011 ini sebanyak 420 keluarga miskin dari 21 kelurahan, masing-masing kelurahan 20 KK. Tapi prosesnya disini kita tidak memberikan uang tapi berupa bahan bangunan dan tenaga kerja, mereka tahunya jadi. Untuk tahun 2011 dana yang diberikan masing-masing KK sebesar 5 juta belum termasuk PPN dan PPH, jadi 3 juta untuk bahan bangunan, 1 juta untuk ongkos tukang. Dari dana yang dikasih, yang harus dikembalikan hanya untuk bahan bangunan saja, ini untuk digulirkan lagi ke keluarga miskin lainnya, itu untuk membina fungsi sosialnya. Oleh UPKM selaku Pembina Keluarga Miskin menagih uang bukan sebagai tagihan tetapi proses pembinaan. Oleh sebab itu UPKM ini kita beri waktu masa berlakunya selama 3 tahun. Tahun pertama proses perbaikan rumah, tahun ke 2, 3 proses kedalam pengguliran. Tapi tidak menutup kemungkinan keluarga miskin ini pada saat pengguliran tidak mampu mengembalikan, dan itu kita tidak memberikan sanksi, karena itu tidak dianggap utang tetapi sebagai proses pembinaan saja. Itu nanti selain diberikan rehabilitasi rumah, diberikan pula pelatihan keterampilan. Dari 20 KK dari 1 kelurahan ini dikelompokkan 10 untuk tata boga, 10 untuk handycraft selama 5 hari, tujuannya agar mereka bisa memperoleh penghasilan diluar penghasilan inti. Sehingga mereka bisa membayar pengguliran dari keterampilan ini. Hasil dari pada itu diharapkan mereka mengembalikan pengguliran utama, sehingga tidak mengurangi penghasilan utama.

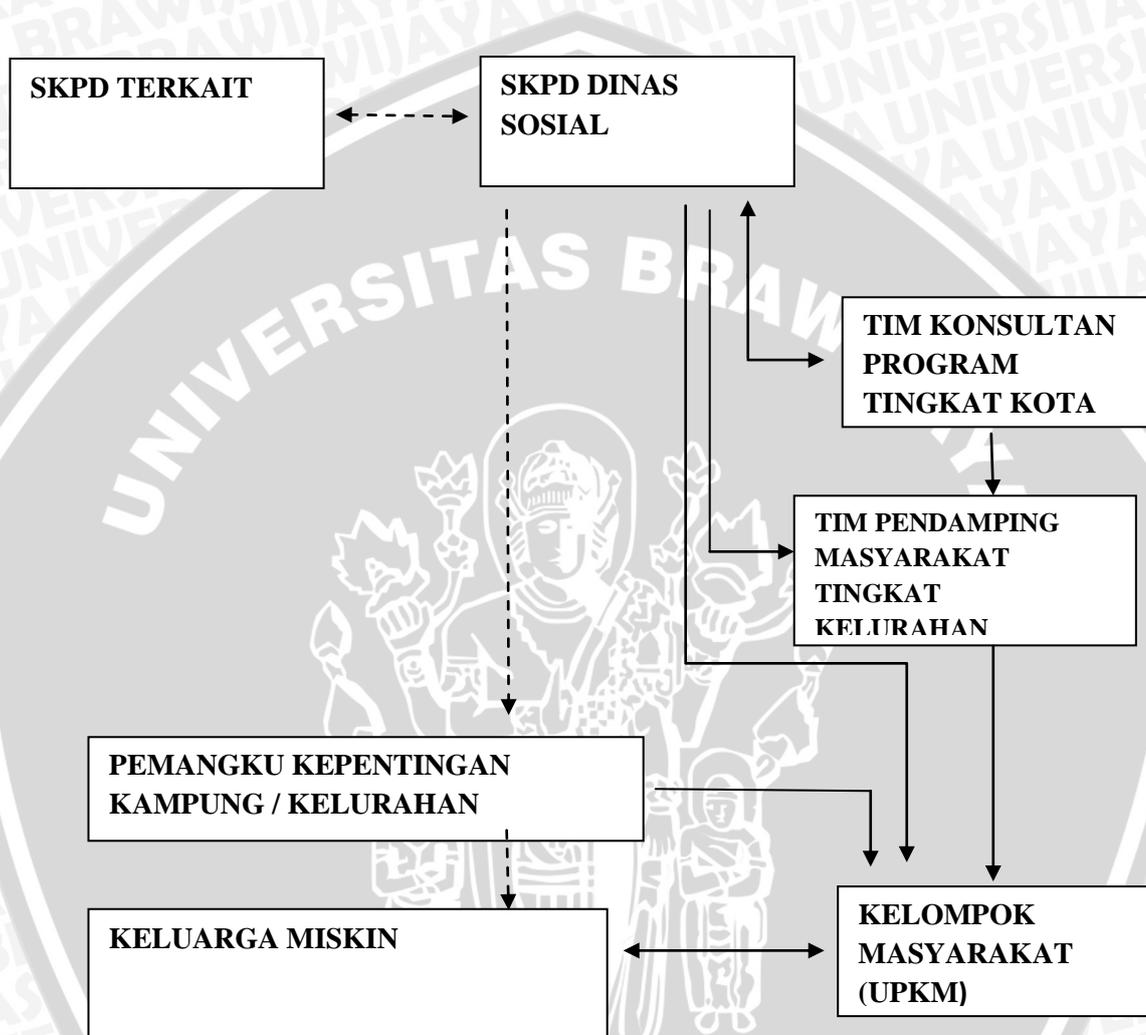
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari penyaluran dana program RSDK ini tidak diberikan dalam bentuk dana (uang), namun dalam bentuk bantuan barang dan kegiatan, seperti dalam kegiatan

perbaikan rumah, bantuan yang diberikan berupa bahan-bahan bangunan dan tenaga kerja. Agar dapat disalurkan kembali kepada masyarakat miskin lainnya maka UPKM melakukan pengguliran dana kepada masyarakat miskin lainnya di wilayah kelurahan setempat. Yang dimana untuk pola pengguliran dan ketentuannya diterapkan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keluarga miskin setempat. Dari dana guliran tersebut oleh UPKM dapat dikembangkan kembali untuk pembinaan keluarga miskin lainnya, seperti pemberian modal usaha kecil kepada warganya yang dimana nantinya dapat membantu mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan adanya pola pengguliran dana ini maka dapat meningkatkan fungsi sosial di masyarakat untuk saling membantu meningkatkan kesejahteraan.

d. Penyiapan Kelembagaan/Organisasi

Dimana setiap implementasi suatu program perlu adanya penyiapan organisasi baik secara teknis maupun administrasi. Hal ini dapat membantu memperlancar dalam pelaksanaan suatu program. Dalam mekanisme organisasi pelaksana program RSDK dapat dilihat dari bagan alur berikut :

Gambar 7
Organisasi Pelaksana Program



Sumber : Laporan Pelaksanaan Program RSDK tahun 2011

1) Pola Pengelolaan Program

Pengelolaan program RSDK, pada awal pelaksanaannya dilakukan dengan pembimbingan dan pendampingan kepada warga sasaran oleh Dinas Sosial yang dibantu oleh Tim Pendamping, baik secara teknis maupun administrasi. Bersamaan dengan itu dilakukan penyiapan dan pembinaan terhadap lembaga

yang dibentuk oleh masyarakat yaitu UPKM yang nantinya menjalankan program secara mandiri dan berkelanjutan.

2) Penanggungjawab program

Dalam pelaksanaan program RSDK yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas Sosial.

3) Koordinasi pengelolaan program antar SKPD

Dalam hal keterpaduan program penanganan masalah kesejahteraan sosial, pelaksanaan Program RSDK Kota Surabaya dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan SKPD yang terkait. Adapun SKPD terkait adalah Bappeko, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Bapemas, Bagian Keuangan, Kecamatan.

4) Kelembagaan UPKM

UPKM dengan personil sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari unsure sebagai berikut :

- a) Unsur perempuan sebanyak 2 (dua) orang.
- b) Unsur tokoh masyarakat 1 (satu) orang.
- c) Unsur keluarga miskin sebanyak 2 (dua) orang.
- d) Unsur warga lainnya sebanyak 1 (satu) orang yang mampu menangani pembukuan keuangan.

Struktur pengurus upkm terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, yang semuanya merangkap sebagai anggota bersama ketiga orang lainnya. Keenam orang tersebut harus penduduk setempat dan memiliki

KTP dengan alamat dilokasi Kelurahan setempat. Pada pelaksanaan tugasnya, UPKM perlu berkoordinasi atau kerjasama dengan lembaga terkait lainnya di wilayah kelurahan setempat. Untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas UPKM dalam pembinaan keluarga miskin, baik pada aspek sosial, ekonomi maupun fisik, UPKM sebagai kelompok masyarakat dapat melakukan perikatan kerjasama atau kontrak kerja dengan instansi pemerintah atau swasta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Tim pendamping

Tujuan kegiatan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat pada pelaksanaan Program RSDK adalah agar pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan skema program dan menumbuhkan kepedulian, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat pada umumnya dan keluarga miskin pada khususnya dalam menjalankan program. pendampingan dalam rangka implementasi Program RSDK dibuat dengan pola, yaitu :

- a) Pendampingan untuk skala kota, dilakukan oleh konsultan program ;
- b) Pendampingan untuk masyarakat (sasaran program) di tingkat Kelurahan dalam menjalankan dan memanfaatkan Program RSDK, dilakukan oleh tim pendampingan.

e. Pelaksanaan Program Di Masyarakat

Pelaksanaan Program RSDK terdiri dari :

1) Temu informasi pengurus UPKM

Kegiatan temu informasi pengurus UPKM Program RSDK pada tingkat kota, dimaksudkan untuk ajang tukar menukar pengalaman dan mengkreasikan pengembangan kegiatan pelaksanaan program, dan sekaligus untuk mendapatkan masukan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan program.

2) Sosialisasi program RSDK tingkat kota.

Kegiatan sosialisasi program RSDK pada tingkat kota, dimaksudkan untuk menyebarluaskan pelaksanaan program pada tingkat kota, khususnya pada institusi yang terkait program sekaligus untuk mendapatkan masukan guna memperlancar pelaksanaan program di lapangan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada awal pelaksanaan program RSDK sebelum pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“Jadi kronologisnya gini mbak, pada saat kita turun melaksanakan program satu tahun, kita mendapatkan data dari hasil musrenbang ditingkat desa, kecamatan trus dikota. Dari hasil musrenbang ini kita pilih alokasi kelurahan mana yang didapat lalu kita usulkan ke Pemkot, itu yang kita ajukan untuk program tahun depan. Begitu program tahun depan turun, kita mulai start dengan sosialisasi tingkat kota, tujuannya agar SKPD penerima manfaat bantuan program ini mengetahui, mulai kecamatan kelurahan dan tokoh masyarakat kelurahan masing-masing”.

Jadi tujuan dari adanya forum sosialisasi tingkat kota program RSDK ini adalah untuk memberikan pengetahuan, penguatan motivasi dan dorongan sinergi antara peran serta masyarakat dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya

kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) mendapatkan informasi dan pemahaman yang efektif tentang program RSDK dan dapat menginspirasi warga/masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam ikut serta menanggulangi masalah kemiskinan Kota Surabaya. Adapun perincian peserta atau undangan adalah sebagai berikut :

a) Unsur SKPD Pemerintah Kota Surabaya.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2. Badan Pengembangan Masyarakat dan Keluarga Berencana
3. Dinas Koperasi dan UMKM
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Bagian penyusunan Program
9. Bagian Hukum
10. Bagian Pemerintahan
11. Bagian Kesejahteraan Rakyat
12. Camat

b) Unsur *Stakeholder* tingkat Kelurahan

1. Lurah
2. Kepala Puskesmas
3. Lembaga ketahanan Masyarakat Kota (LKMK)
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

5. Tokoh Masyarakat
6. Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM)

3) Sosialisasi program RSDK tingkat Kelurahan

Kegiatan sosialisasi program RSDK pada tingkat Kelurahan, dimaksudkan untuk menyebarluaskan skema pelaksanaan program kepada pemangku kepentingan tingkat kelurahan, sekaligus untuk mendapatkan masukan guna memperlancar pelaksanaan program di lapangan. Dalam hal ini pemangku kepentingan tersebut adalah Lurah, LKMK, PKK Kelurahan, para ketua RW dan tokoh masyarakat. Kegiatan pengenalan dilaksanakan pada awal pelaksanaan program RSDK di tingkat Kelurahan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan langsung kepada masyarakat tentang apa tujuan utama dari program RSDK. Sesuai dengan pemaparan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat yang mengatakan bahwa :

“Setelah sosialisasi tingkat kota dilaksanakan kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi tingkat kelurahan, yang dimana kita berikan dimasing-masing kelurahan penerima bantuan. Kita berikan sosialisasi di tingkat kelurahan, tujuannya memberikan penjelasan kepada masyarakat secara langsung di tiap kelurahan tentang program RSDK sebagai salah satu program RSDK yang bertujuan untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial”.

4) Penyiapan UPKM

Kegiatan penyiapan UPKM yang berupa kegiatan pembentukan atau penguatan kelembagaan UPKM program RSDK, dimaksudkan untuk membentuk dan memperkuat lembaga pelaksana program di tingkat Kelurahan sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program dilapangan. Kegiatan pembentukan lembaga

UPKM dilaksanakan pada awal pelaksanaan program RSDK sebelum pelaksanaan kegiatan teknis operasional selanjutnya. Pola pembentukan UPKM harus berdasarkan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat (*bottom up*). Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) tersebut dengan personil pengelolaan sebanyak 6 orang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“Setelah mereka diberikan sosialisasi, mereka diwajibkan membentuk UPKM yang terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara, 3 anggota yang unsurnya terdiri dari tokoh wanita/ibu-ibu PKK, karang taruna, anggota bisa diambil dari salah satu keluarga miskin yang emndapatkan sasaran, sehingga jelas dan terbuka. Diharapkan bendahara dan sekretaris memang bisa membuat pembukuan”.

5) Pembekalan UPKM

Salah satu dari keluaran/output utama program RSDK adalah penyiapan lembaga lokal UPKM (Unit Pembinaan Keluarga Miskin). Kegiatan pembekalan UPKM yang berupa Kegiatan lokakarya kelembagaan UPKM program RSDK, dimaksudkan untuk membekali kemampuan teknis dan manajemen sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program di lapangan dan mengembangkannya secara mandiri. Selain itu juga untuk meningkatkan motivasi, kesetiakawanan dan rasa tanggungjawab sosial UPKM dalam keikutsertaan membantu pemerintah kota dalam pengentasan kemiskinan di daerahnya masing-masing, serta menumbuhkan inisiatif, kreatifitas dan jiwa kemandirian UPKM. Pembekalan UPKM dapat pula dilakukan secara informal maupun formal guna peningkatan kapasitas UPKM sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tugas dan

perannya. Keberhasilan program RSDK ini tidak lepas dari peran UPKM yang dibentuk khusus untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial pada masing-masing kampung. Adapun tugas dan kegiatan UPKM terhadap keberadaan dan kondisi keluarga miskin disekitarnya, yaitu :

- a) Melakukan pendataan keadaan dan masalah Gakin
 - b) Menyusun rencana kegiatan
 - c) Menyampaikan data Gakin keada instansi terkait
 - d) Melakukan kegiatan pembinaan Gakin
 - e) Mengadministrasikan kegiatan
 - f) Mengelola bantuan yang ditujukan kepada Gakin
 - g) Melakukan koordinasi dan kerja sama
 - h) Membuat catatan / laporan perkembangan kegiatan
- 6) Survey sasaran program.

Survey sasaran program adalah survey lapangan untuk menentukan sasaran penerima program RSDK. Kegiatan survey verifikasi dilaksanakan setelah pembentukan UPKM dan sebelum dilaksanakannya pertemuan penyusunan KRKK. Kegiatan survey ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung warga mana yang akan diberikan bantuan sehingga benar-benar tepat sasaran kepada keluarga miskin. Kegiatan survey keluarga miskin berdasarkan usulan dari Musrenbang, RW diwilayah masing-masing berdasarkan perkembangan yang ada, dan Puskesmas khusus untuk data keluarga miskin yang menderita penyakit TBC.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“Jadi setelah UPKM terbentuk mereka langsung bekerja, bekerjanya itu memilih sasaran keluarga sesuai dengan musrenbang. Klo musrenbang ini masing kurang datanya bisa diambilkan kepada masyarakat yang belum masuk datanya, cuman skala prioritasnya adalah di musrenbang, setelah itu baru disepakati oleh mereka siapa calon penerima, sapa daftar tunggunya, karena biasanya kalo survey bisa lebih dari 20 KK tergantung potensi kemiskinan daerahnya.”

Diperjelas dengan pernyataan dari Ketua lembaga UPKM kelurahan Tambak Wedi, mengatakan bahwa :

“Untuk pelaksanaan ini saya kasihkan bener-bener yang tidak mampu mbak. Jadi saya survey lapangan dulu sebelum mengusulkan warga mana yang menerima bantuan, kenyataan dilapangan memang benar-benar tidak mampu yang saya ajukan untuk direhab rumahnya”.

Lebih diperjelas lagi dengan hasil wawancara dari Ketua UPKM kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengatakan bahwa :

“Program RSDK ini sasarannya benar-benar untuk keluarga yang tidak mampu mbak, jadi saya survey dulu ke warga, mana saja yang membutuhkan bantuan ini. Jadi waktu saya survey juga saya foto mbak rumahnya, biar ada buktinya”.

7) Pembuatan KRKK (Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung)

Kegiatan musyawarah penyusunan KRKK, dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja sebagai dasar realisasi pelaksanaan kegiatan program RSDK yang

memuat daftar calon penerima program, baik kegiatan pelatihan maupun perbaikan rumah. Kegiatan musyawarah penyusunan KRKK dilaksanakan setelah didapatkan data konkrit tentang sasaran calon penerima program. sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“Setelah survey baru diadakan kesepakatan rencana kegiatan kampung, disitu ditentukan dalam KRKK ini calon penerima manfaat, ini disepakati oleh semua RT, RW dan tokoh masyarakat. Setelah itu mereka membuat kesepakatan juga kepada calon penerima ini apakah sanggup menerima perbaikan rumah ini kemudian apakah sanggup untuk digulirkan untuk digulirkan kepada keluarga miskin lainnya. Kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan rumah”.

Jadi usulan yang diajukan oleh warga melalui ketua RW dimusyawarahkan dengan referensi data hasil verifikasi yang dilakukan oleh UPKM. Musyawarah tersebut bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama tentang rencana realisasi program untuk keluarga miskin yang terpilih. Kegiatan pengesahan dokumen KRKK, dimaksudkan untuk memberikan legalitas usulan UPKM yang nantinya digunakan sebagai dasar realisasi program RSDK. Kegiatan pengesahan dilakukan setelah tercapai kesepakatan tentang KRKK pada musyawarah penyusunan KRKK.

8) Pelatihan keterampilan usaha

Kegiatan pelatihan keterampilan usaha dilaksanakan secara bersama untuk semua anggota KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kelurahan, yang namanya tercantum pada dokumen KRKK. Beberapa materi yang diberikan pada pelaksanaan kegiatan tersebut adalah latihan keterampilan dan wawasan usaha.

Dengan memberikan keterampilan usaha yang bisa digunakan sebagai modal guna menumbuhkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“Kita mengadakan pelatihan keterampilan untuk KUBE ini supaya mereka dapat mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. Nanti di tiap kelurahan dibagi dua kelompok, satu kelompok terdiri dari 10 orang. Ada yang dapat pelatihan tata boga, yang satu kelompok dapat pelatihan kerajinan tangan”.

Jelas sekali bahwa dengan adanya pelatihan keterampilan usaha ini masyarakat dapat mengembangkan keterampilan yang diberikan agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan dapat pula meningkatkan kesejahteraan. Selain itu hasil dari pada usaha tersebut dapat membantu untuk mengembalikan pengkuliran dana bantuan, sehingga dapat membantu untuk pengkuliran kepada keluarga miskin lainnya. Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan ini tiap kelurahan diberikan bantuan peralatan kerja, untuk tata boga diberikan bantuan kompor gas, kompor minyak tanah, baskom plastic, blender, timbangan, dan wajan teflon, sedangkan untuk kelompok kerajinan tangan diberikan bantuan alat berupa mesin jahit. Pelaksanaan ini dilaksanakan pada bulan September selama 5 hari.

9) Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, secara teknis dilakukan sesuai dengan usulan keluarga miskin, baik obyek maupun bahannya seperti untuk perbaikan atap, dinding, lain atau komponen bangunan lainnya. pekerjaan

tersebut, dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat, dalam hak ini adalah UPKM yang dilakukan secara swakelola yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan dan bentuk partisipasi masyarakat setempat harus tertuang dalam kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penanggungjawab kelompok masyarakat (UPKM). Dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah ini, masyarakat tidak diberikan bantuan berupa uang, tapi berupa bahan bangunan.

Diperjelas dengan pendapat oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengatakan bahwa :

“proses dari pada bantuan rehabilitasi rumah sesuai dengan Perpres no 54 mengenai bantuan kepada masyarakat harus dilaksanakan swakelola, bukan dinas yang melaksanakan, bukan pihak ketiga yang melaksanakan, tapi masyarakatnya sendiri. Didalam acuannya swakelola ini mengacu pada 3 cermin. Cermin pertama itu 40%, cermin kedua itu 30%, dan cermin ketiga itu 30%. Kita berikan kepada upkm untuk dilaksanakan perbaikan rumahnya, berarti cermin yang pertama 40% hanya diberikan 8 rumah, cermin kedua 6 rumah dan cermin ketiga 6 rumah. Jadi pembangunan sesuai progress report UPKM, klo blm 40% belum bisa diberikan sisanya”.

Jadi dalam pelaksanaan perbaikan rumah yang mengacu pada Perpres no 54 tentang pelaksanaan berdasarkan swakelola ini bertujuan untuk mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Sehingga tidak hanya dari UPKM saja yang mendukung pelaksanaan program ini, namun diperlukan juga dukungan dari keluarga miskin penerima bantuan dan toko bahan bangunan atau galangan untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dengan mudah. Selain itu pula

dibutuhkan juga partisipasi dari warga sekitar maupun keluarga dalam proses pembangunan.

Sesuai target program, jumlah perbaikan rumah pada tahun 2011 adalah sebanyak 420 unit rumah keluarga miskin yang tersebar merata di 21 kelurahan. Perbaikan rumah tersebut meliputi kegiatan perbaikan pada lantai, atap, dinding. Perbaikan rumah untuk penderita TBC pada program ini ditujukan agar rumah keluarga miskin penderita TBC sehat sehingga mengurangi penularan penyakit TBC pada anggota keluarga lain. Adapun jumlah KK yang mendapat perbaikan rumah program RSDK tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5
Jumlah KK yang Mendapat Perbaikan Rumah

KECAMATAN		KELURAHAN		KK yang mendapat perbaikan rumah		
				Non TB	TB	JUMLAH
01	Benowo	01	T. O Wilangun	20	0	20
		02	Klakahrejo	19	1	20
02	Pakal	03	Babat Jerawat	20	0	20
03	Sambikerep	04	Sambikerep	20	0	20
04	Lakarsantri	05	Sumur Welut	20	0	20
		06	Lakarsantri	20	0	20
		07	Lidah Wetan	20	0	20
05	Wiyung	08	Babatan	19	1	20
06	Karangpilang	09	Karangpilang	20	0	20

KECAMATAN		KELURAHAN		KK yang mendapat perbaikan rumah		
				Non TB	TB	JUMLAH
07	Wonokromo	10	Sawunggaling	20	0	20
08	Wonocolo	11	Bendul Merisi			20
09	Tegalsari	12	Keputran	15	5	20
10	Bubutan	13	Gundih	19	1	20
		14	Tembok Dukuh	20	0	20
		15	Jepara	19	1	20
11	Gubeng	16	Gubeng			20
12	Mulyorejo	17	Kalijudan	19	1	20
13	Semampir	18	Pegirian			20
14	Kenjeran	19	Sidotopo Wetan			20
		20	T. K. Kedinding	20	0	20
		21	Tambak Wedi	20	0	20
Jumlah						420

Sumber : Laporan Kegiatan Program RSDK tahun 2011

10) Lokakarya pertanggungjawaban UPKM

Output/keluaran dari Program RSDK tahun 2011 selain pembentukan lembaga lokal (UPKM), pelatihan usaha dan perbaikan rumah, adalah lokakarya pertanggungjawaban UPKM. Kegiatan Lokakarya pertanggungjawaban UPKM pada tingkat kota, dimaksudkan untuk menerima laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing UPKM kepada Dinas Sosial. Dalam kegiatan lokakarya pertanggungjawaban ini pihak Dinas Sosial dapat

mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing UPKM dalam membina keluarga miskin dan sejauh mana perkembangannya, selain itu juga dapat diketahui pula apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program RSDK.

2. Dampak dari program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota

Surabaya.

Pada dasarnya pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya tetap mengedepankan pola Tridaya. Adapun komponen pola Tridaya yaitu :

- a) Daya manusia : berupa kegiatan pengembangan masyarakat atau sumber daya manusia.
- b) Daya lingkungan : berupa kegiatan perbaikan fisik lingkungan atau rumah.
- c) Daya usaha ; berupa kegiatan pengembangan usaha kecil menengah.

Dengan menggunakan pola Tridaya diharapkan akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat memberikan dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak perubahan tersebut adalah :

a) Dampak terhadap perubahan sosial

Mengenai kondisi pada bidang sosial yang terjadi di masyarakat miskin memang pada bidang ini banyak kita temukan beberapa masalah yang sudah seharusnya menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. Masalah sosial memang sudah menjadi masalah yang umum, akan tetapi bagaimana cara penyelesaiannya merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Program RSDK

mengupayakan pemberdayaan pada bidang ekonomi, melakukan perbaikan pada bidang fisik dan lingkungan, program RSDK juga menyentuh masalah sosial dengan konsepnya untuk memberdayakan masalah sosial/manusia.

Dalam proses pelaksanaan teknis guna memperlancar jalannya implementasi program, Dinas Sosial melakukan pemberdayaan sosial melalui sumber daya manusia dengan membentuk lembaga lokal pada tiap kelurahan yang dinamakan UPKM. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat, yang mengatakan bahwa :

“Dalam bidang pemberdayaan sosial ini, kita peruntukan kepada sumber daya manusia dengan pembentukan UPKM, yang nantinya UPKM tersebut dituntut untuk ikut bekerjasama membantu dalam membina keluarga miskin penerima bantuan di kelurahannya. Disini UPKM juga ambil alih dalam penentuan penerima bantuan melalui hasil survey sehingga dapat tepat sasaran. Selain itu pula dengan UPKM bertugas untuk membina warga penerima bantuan”.

Oleh karena itu perlu dilakukan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang ditindaklanjuti dengan perencanaan dan program pembangunan perumahan serta meningkatkan kerjasama dengan seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan permukiman. Selain itu pula perlu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga teknis dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perbaikan rumah tidak layak huni. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat, mengatakan bahwa :

“untuk mendukung pelaksanaan ini peran UPKM sangat besar sekali mbak. Makanya agar UPKM mampu menjalankan perannya dengan baik, kita pada saat awal pembentukan, kita memberikan pembekalan terlebih dahulu pada setiap UPKM. Tidak hanya pada UPKM saja mbak, dari kita juga memberikan sosialisasi apa itu sebenarnya program RSDK dan apa tujuan program RSDK ini. Dengan begitu diharapkan masyarakat mampu menjalin kerjasama dan rasa

gotongroyong untuk dapat mendukung program ini. Sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan kemiskinan secara mandiri.”

Selain itu, menurut ketua UPKM kelurahan tambak wedi mengatakan :

“bantuan ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa kepedulian sosial antar sesama. Jadi diharapkan masyarakat mampu mengatasi kemiskinannya secara mandiri.”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dampak dari upaya penanggulangan kemiskinan di bidang sosial dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program RSDK. Karena dalam program RSDK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu warga miskin untuk mendapatkan program perbaikan rumah tidak layak huni dalam proses pembangunan. Selain itu dalam pelaksanaan program ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin penerima bantuan untuk dapat memelihara kesehatan rumah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara sosial.

b) Dampak terhadap perubahan lingkungan

Dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) salah satu bentuk program yang diimplementasikan adalah perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak ini. Dengan adanya program RSDK oleh Dinas Sosial mulai banyak perkembangan yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Salah satu dampak yang dirasakan adalah perubahan fisik. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat yang mengatakan bahwa :

“Dengan Program RSDK ini melalui kegiatan perbaikan rumah ini diharapkan masyarakat dapat hidup lebih layak dan lebih dengan kondisi rumah yang sehat. Sehingga dapat merubah pola hidup yang sehat juga.

Dampak program ini terhadap perubahan fisik sudah dirasakan oleh keluarga miskin penerima bantuan dengan perubahan bentuk fisik rumah yang semula tidak memadai menjadi lebih layak huni. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara langsung dengan keluarga miskin penerima program.

Hasil wawancara dengan penerima bantuan (1) dari kelurahan Kali judan mengatakan bahwa :

“Bantuan ini sangat membantu sekali mbak, soalnya kan bisa buat bangun rumah. Kemarin bantuannya saya pake buat betulin atap rumah. Sekarang sudah gak bocor lagi mbak kayak dulu. Dulu masih genteng jd bocor, sekarang udah asbes dan gak bocor lagi.”

Dipertegas dengan pendapat penerima bantuan (2) dari kelurahan Kalijudan, yang mengatakan bahwa :

“Bantuan ini sangat membantu sekali. Saya pake buat bangun atap dan lantai. Jadi yang biasanya ujan trus bocor dan banjir sekarang sudah enggak. Trus jadi gak gampang sakit-sakitan mbak, soalnya kalo ujan sering banjir, tapi dulu sebelum lantainya dibetulin itu sering banget mbak kena penyakit, kalo gak masuk angin yang diare mbak”.

Dampak perubahan fisik rumah tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan dari kelurahan Kalijudan, namun dirasakan juga oleh penerima bantuan (1) dari kelurahan Kali kedinding yang mengatakan bahwa :

“bantuan ini sangat membantu mbak buat perbaikan rumah. Dampak yang ada itu mbak, atap rumah saya sekarang bukan genteng lagi tapi sudah jadi asbes, jd udah gak pernah bocor lagi mbak.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya program perbaikan rumah ini telah membawa dampak yang positif secara langsung bagi masyarakat miskin. Masyarakat disini merasa diberikan kenyamanan dengan adanya perubahan kondisi rumah yang lebih layak huni. Kondisi rumah yang tadinya kurang menyenangkan, dan dapat dikatakan kurang nyaman kini telah berubah menjadi baik dan bisa dimanfaatkan secara maksimal, ini merupakan perubahan yang sangat diharapkan oleh masyarakat miskin.

c) **Dampak terhadap perubahan ekonomi**

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat untuk dapat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Salah satu dampak yang ingin diperoleh dari program ini adalah adanya perubahan pada bidang ekonomi. Karena dimanapun juga, dalam setiap peningkatan sebuah taraf hidup kesejahteraan, bidang ekonomi inilah yang kemudian menjadi penggerak utama untuk melakukan perubahan. Sehingga dalam hal ini, pelaksanaan Program RSDK khususnya pada bidang ekonomi yang terjadi pada kelurahan-kelurahan penerima bantuan bisa dikatakan memiliki dampak yang luar biasa terdapat perubahan kualitas hidup masyarakatnya. Meskipun dalam implementasi dilapangan banyak juga kendala yang ditemui terkait dengan bidang ini. Dalam pelaksanaan Program RSDK untuk menumbuhkan ekonomi keluarga miskin penerima bantuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dimana kelompok tersebut diberikan pelatihan keterampilan usaha sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan sebuah ekonomi kerakyatan

mampu tumbuh dan menjadi pondasi bagi roda jalannya perekonomian. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya Program RSDK ini diharapkan mampu untuk merubah kondisi ekonomi masyarakatnya juga khususnya masyarakat miskin. Dengan kondisi perbaikan rumah yang lebih layak dan sehat dapat menjadi sebuah stimulant untuk masyarakat lebih produktif agar lebih memiliki semangat untuk mengatasi kemiskinan secara mandiri. Selain itu masyarakat dapat melakukan pinjaman modal melalui penggalangan dana untuk peningkatan ketrampilannya sehingga dapat menjadi bekal usaha. Tetapi secara teori memang diharapkan seperti itu mbak, tapi kondisi dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan, banyak sekali kendala-kendala yang ada”.

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, bahwa situasi dilapangan tidak semua warga keluarga miskin penerima bantuan merasakan perubahan pada ekonomi keluarganya. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara dengan ketua UPKM kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengatakan bahwa :

“Kalo pelatihan pertama itu setelah dana cair, tapi saya kira itu mubadir mbak. Soalnya dari pelatihan itu ya wes gitu tok, gak ada tindak lanjut. Kalo kita suruh mengadakan sendiri dana dari mana. Jadi untuk pengembangan selanjutnya tidak ada. Lagian juga mbak orang buat penggalangan dana aja mereka kadang gak ada uang gimana mau bikin usaha, uang dari mana”.

Pernyataan tersebut diperjelas dengan pernyataan oleh keluarga penerima bantuan (1) kelurahan Tanah Kali Kedinding yang mengatakan :

“Memang bantuan ini bagi saya sangat membantu, rumah saya jadi lebih layak mbak, saya juga bisa bangun rumah tanpa biaya sendiri. Tapi kalo membantu buat menambah perekonomian sih saya gak ngerasain mbak. Memang saya sama istri mendapatkan pelatihan tapi gak saya teruskan mbak soalnya gak ada modalnya mbak. Trus kan belum lagi tiap bulan harus bayar uang guliran, nanti belum pengeluaran sehari-hari, modal dari mana mbak”.

Jadi kondisi seperti itulah yang kemudian menjadikan sedikit permasalahan yang ada dilapangan terkait dengan penyaluran pinjaman dana bergulir tersebut. Namun tidak hanya faktor dana saja, dibutuhkan pula dukungan dan kesadaran dari masyarakat dalam mendukung meningkatkan kehidupan ekonominya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya.

Pada umumnya setiap implementasi suatu program terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang dimana dapat mendukung berjalannya program. Dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasinya.

a. Faktor Pendukung

1) Dana

Dalam pelaksanaan program pembangunan baik di pusat maupun di daerah faktor dana merupakan hal yang sangat penting guna memperlancar kegiatan. Suatu program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai harus dapat mengalokasikan dana dengan baik. Dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial memberikan bantuan dana kepada masing-masing kelurahan penerima bantuan. Selain itu dalam pelaksanaan program RSDK ini

proses pencairan dana sangat mempengaruhi keberhasilan program. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada warga penerima bantuan tidak hanya menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan program RSDK namun peneliti juga menanyakan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program RSDK. Hasil wawancara dengan ketua UPKM di kelurahan Kalijudan mengenai pemberian dana mengatakan. Bahwa

“waktu pelaksanaan itu mbak faktor yang paling penting dan berpengaruh besar itu dana, jadi kalo proses pencairan dananya cepet yah kegiatannya juga cepet bisa dikerjain mbak, tapi kalau dananya lama dikasihnya yah gak bisa jalan-jalan mbak, uang dari mana buat beli bahan bangunannya, kalo ngutang dulu digalangan kan juga gak bisa. Kalo masalah besarnya dana yah cukup gak cukup mbak, yah sebenarnya dana 3 juta itu juga cuma bisa betulin ala kadarnya. Tapi yah lumayan mbak bisa betulin dari yang jelek banget bisa jadi layak gitu lah mbak”

Peneliti juga menanyakan kepada ketua UPKM kelurahan Tambak Wedi yang mengatakan :

“faktor yang paling penting mendukung itu yang dana bantuan yang dikasih mbak. Kalo gak ada dananya yah gak bakal bisa bangun rumahnya mbak. Semakin cepet dananya cair, yah semakin cepet juga mbak pelaksanaan bangun rumahnya. Kalo disini pencairan dana Alhamdulillah cepet bgt mbak, soalnya kita sebagai UPKM terutama saya sebagai ketua langsung memberikan syarat-syarat apa aja yang dibutuhkan sama dinas mbak, jd pencairan dananya cepet mbak. Padahal dulu kelurahan disini itu paling akhir yang dikasih pelatihan, tapi disini pemberian dananya juga termasuk paling cepet mbak, soalnya ada kelurahan laen yang duluan tapi yah kita duluan yang dapet dananya.”

Tidak hanya menanyakan kepada ketua UPKM namun peneliti juga menanyakan kepada warga penerima bantuan, salah satunya adalah dengan penerima bantuan (2) di kelurahan Kali Kedinding yang mengatakan bahwa :

“Dananya cepet kok mbak keluarnya, jadi saya juga bisa langsung betulin rumah mbak. Yah dana ini bantu sekali sih mbak. Alhamdulillah mbak bisa buat betulin rumah dikit-dikit. Kalo sekarang saya baru bisa betulin tembok aja mbak. Nanti kalo dana yang ini sudah lunas, saya rencana pinjam lagi buat betulin yang laen.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan program RSDK adalah dana yang cukup. Dengan dana yang cukup, maka UPKM pada setiap kelurahan dapat menjalankan program RSDK dengan baik dan tepat sesuai tujuannya.

2) Sarana dan Prasarana.

Program RSDK sepenuhnya bertumpu pada dana APBD dan merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Kota Surabaya. Bantuan yang diberikan dikelola oleh institusi masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis masyarakat. Dalam hal ini dipercayakan kepada lembaga lokal atau yang disebut dengan UPKM yang dipilih oleh masyarakat dari tingkat RT, RW, dan kelurahan. UPKM sebagai lembaga konsultatif yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, dibantu oleh Tim Konsultan dan Tim Pendamping.

Salah satu aspek yang mendukung dalam pelaksanaan program RSDK adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai

dengan rencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat yang mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan program RSDK diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kita memberikan sarana dan prasarana berupa stimulan-stimulan yang mendukung pelaksanaan program, sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pembekalan pelatihan keterampilan, kita berikan stimulan ke KUBE berupa peralatan alat kerja. Untuk KUBE Kerajinan diberikan 1 buah mesin jahit, sedangkan KUBE Tata boga berupa kompor gas, kompor minyak tanah, baskom plastik, blender, timbangan wajan Teflon. Tapi gak cuma dalam sarana prasarana untuk KUBE, tapi juga diberikan stimulan penyiapan alat kerja untuk UPKM guna kelancaran melaksanakan program RSDK. Stimulan yang dikasih berupa mesin ketik elektrik, kursi kerja, meja kerja, papan data, papan nama UPKM.”

Peneliti juga menanyakan mengenai faktor sarana dan prasana kepada ketua UPKM kelurahan Tanah Kali Kedinging. Beliau mengatakan bahwa :

“Buat mendukung program ini itu kita dikasih bantuan berupa stimulan peralatan kerja mbak. Itu ada yang untuk UPKM, juga ada stimulant alat kerja buat yang keterampilan, jadi di pake waktu pembekalan juga mbak. Jadi kita gak perlu beli alat-alatnya lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program RSDK sangat didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasaran tersebut dapat berupa peralatan kerja yang dibutuhkan, sehingga mampu memperlancar jalannya pelaksanaan program.

b. Faktor Penghambat

1) Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi dari implementasi suatu program yang mengacu pada pemberdayaan masyarakat adalah tingkat partisipasi masyarakat. Dimana tingkat partisipasi masyarakat ditentukan oleh kemampuan partisipasi

serta keinginan untuk berperan dalam proses menjalankan pembangunan secara gotong-royong. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengenai faktor partisipasi dalam pelaksanaan program RSDK, beliau mengatakan bahwa :

“Kalo waktu proses pelaksanaan itu mbak, memang yang berperan besar itu dari masyarakatnya tapi masyarakatnya sendiri juga bisa sebagai penghambat dari pelaksanaan itu sendiri. Karena memang tujuan lain dari program RSDK ini itu untuk melihat bagaimana partisipasi yang terjadi di masyarakatnya. Biasanya partisipasi ini dilihat dari apakah masyarakatnya harus diajak dulu untuk benar-benar mau berpartisipasi atau malah masyarakatnya berinisiatif sendiri mbak.”

Peneliti menanyakan pertanyaan serupa tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan kepada ketua UPKM kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengatakan bahwa :

“Yah kalo penghambatnya itu dari faktor partisipasi masyarakatnya yang kurang mbak. Biasanya ada masyarakat yang harus didorong dulu untuk benar-benar mau berpartisipasi, jadi kita yah harus lebih sering dan sabar buat dampingi sama memberikan arahan ke mereka-mereka. Yah meskipun mereka sendiri dengerin kalo kita kasih penjelasan, tapi nyatanya juga ada yang agak sulit buat dikasih pemahaman.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat yang kurang merupakan faktor penghambat dalam menjalankan program RSDK. Dalam hal ini perlu adanya perhatian dan solusi dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial mengenai bagaimana caranya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

2) Kurangnya Pemahaman Masyarakat akan Pentingnya Pengguliran

Dana

Sumber daya keuangan merupakan faktor yang terpenting dalam pelaksanaan program RSDK. Sumber daya keuangan dapat menjadi faktor pendukung dalam suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan program RSDK ini pengelolaan sumber daya keuangan dilakukan melalui pengguliran dana oleh masyarakat. Dimana nantinya pengguliran dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat miskin lainnya. Oleh karena itu keberhasilan dalam pelaksanaan program RSDK ini salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan pengguliran dana. berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat mengenai pentingnya pengguliran dana, beliau mengatakan bahwa :

“pengguliran dana disini dikelola oleh UPKM. Bagaimana UPKM dapat menggulirkan dana tersebut ke GAKIN. Nah disini biasanya masyarakat miskin penerima bantuan agak sulit untuk melakukan pengguliran dana mbak. Padahal pengguliran dana ini sangat penting sekali dalam keberhasilan tujuan program RSDK. ”

Peneliti menanyakan pertanyaan serupa kepada ketua UPKM kelurahan Tambak Wedi, beliau mengatakan bahwa :

“Disini hambatannya itu dalam proses pengguliran dana. Sulit banget mbak buat ngajakin warga buat bayar guliran dana tiap bulannya. Yah alasannya sih ada aja mbak, yang buat kebutuhan sehari-hari. Tapi banyak juga yang nganggep uang bantuan yang dikasih itu gak perlu dikembalikan lagi, soalnya mereka mikirnya kalo bantuan dari pemerintah gak usah dibalikin. Padahal itu dikembalikannya bukan ke Dinas Sosial, tapi ke UPKM. Nanti dari pihak kita UPKM bisa digulirkan lagi dananya buat yang lain. Jadi masyarakat itu kurang paham sama fungsi dari pengguliran dana ini. ”

Pendapat yang sama oleh ketua UPKM di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yang mengatakan bahwa :

“masyarakat disini itu mbak kurang paham tujuan program RSDK dalam pengguliran dana. jadi masyarakat disini itu kalo di ingetin masalah guliran dana itu bilang kalo bantuan itu kok dikembalikan lagi. Padahal dari guliran

dana tersebut ada maksud dan tujuannya. Lah wong mereka itu loh dulu awal bilang iya sanggup buat gulirin dan tiap bulan, tapi nyatanya yo nyandet kayak gini mbak. Jadi gimana yah mbak, sebagian masyarakat itu kurang paham masalah tujuan dari pengguliran dana itu sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengguliran dana merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program RSDK. Dengan demikian sangat diperlukan solusi bagaimana agar masyarakat mampu memahami tujuan dari adanya program RSDK khususnya pada kegiatan pengguliran dana.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya

a. Tujuan dan Sasaran Program

Tingkat masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah semakin hari semakin kompleks, diantaranya adalah terbatasnya lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dimana saat ini banyak sekali muncul rumah-rumah kumuh yang tidak layak huni. Hal ini tidak seimbang dengan adanya bangunan atau gedung-gedung yang megah. Oleh sebab itu pemerintah dalam mengatasi masalah ini membuat beberapa program untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh, salah satunya melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) yang dimana dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh sudah diatur dalam Perwali No 33 tahun 2011. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat yang dimana bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat terutama keluarga miskin secara mandiri baik dalam segi ekonomi, lingkungan dan sosialnya. Menurut Suryono (2010 : 262), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya bagi masyarakat yang kurang memiliki akses pada sumber-sumber daya pembangunan) harus didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Dimana dalam program ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat kampung dalam pelaksanaan. Sehingga pelaksanaan dilapangan dilakukan berdasarkan dari aspirasi dari masyarakat setempat yang dimana keberhasilannya tergantung pada partisipasi masyarakatnya. Dengan begitu masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Selain itu dengan adanya program RSDK ini dapat meningkatkan rasa kegotongroyongan antar tetangga.

Dengan tujuan pelaksanaan program RSDK di Surabaya sudah sesuai dengan proses yang harus dilakukan dimana sasaran utamanya adalah keluarga miskin yang merupakan penduduk asli kota Surabaya dan penduduk asli di kelurahan penerima bantuan dan disertai surat keterangan miskin dan rumah tidak layak huni dari kelurahan, selain itu juga disertakan dengan foto kondisi rumah. Warga penerima bantuan diwajibkan untuk mengembalikan dana bantuan, agar dapat digulirkan kembali kepada warga yang lainnya. Namun bagi warga yang memiliki penyakit TB dibebaskan dari penguliran dana.

Hingga saat ini dalam pelaksanaanya dilapangan sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Jadi pelaksanaan program RSDK ini sudah tepat sasaran. Yang dimana pada pelaksanaan tahun 2011 sudah sebanyak 21 kelurahan dengan

masing-masing kelurahan 20 KK, sehingga sudah 420 keluarga miskin yang menerima bantuan dalam perbaikan rumah untuk lebih layak huni. Sehingga dapat pula memperbaiki kondisi kesehatan rumah.

b. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana.

1. Komunikasi antar organisasi terkait

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Hort dan Van Mater (dalam Widodo, 2007:97) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh pada individu (*implementers*). Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan dan koordinasi yang baik dengan instansi lain, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi dalam implementasi suatu program.

Dalam proses pelaksanaan program RSDK, komunikasi merupakan hal yang penting. Dengan adanya komunikasi maka dapat dijadikan sebagai sebuah penilaian atau evaluasi untuk mengetahui kekurangan apa saja yang ada dalam pelaksanaan di lapangan. Proses komunikasi ini dilakukan antar Dinas Sosial dengan lembaga lokal yang ada di tiap kelurahan atau yang disebut dengan UPKM. UPKM memiliki wewenang untuk mengatur segala sesuatu mengenai pelaksanaan di masing-masing kelurahan. UPKM wajib memberikan laporan kepada Dinas Sosial melalui tim konsultan dan pendamping.

2. Kegiatan-kegiatan pelaksana

a. Kegiatan Penyiapan Kelembagaan program di masyarakat

Upaya mulia untuk mengentaskan dan meningkatkan kesejahteraan Keluarga Miskin yang telah difasilitasi dan dilaksanakan oleh Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dinas Sosial Kota Surabaya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan persiapan kepada tiap UPKM dalam pelaksanaan program. Kegiatan penyiapan UPKM ini berupa kegiatan pembentukan atau penguatan kelembagaan UPKM guna membentuk dan memperkuat lembaga pelaksanaan program ditingkat Kelurahan sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program dilapangan. Kegiatan ini dilakukan pada awal pelaksanaan program RSDK sebelum pelaksanaan kegiatan teknis operasional selanjutnya.

b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha

Keluarga miskin yang mendapat bantuan perbaikan rumah dari program RSDK, harus bersedia mengikuti pelatihan usaha. Pelatihan ini diharapkan untuk dapat menjadikan keluarga miskin mampu mengatasi kemiskinan secara mandiri. Pembekalan pelatihan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan karakteristik, keinginan, dan potensi yang dimiliki. Warga dapat memilih pembekalan dalam bidang tata boga atau keterampilan tangan.

c. Kegiatan Perbaikan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan perbaikan rumah dilaksanakan oleh UPKM secara swakelola yang terintegrasi atau terkait dengan pelaksanaan Program RSDK tahun 2011. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan meliputi perencanaan, pelaksanaan perbaikan, pengawasan dan pelaporan.

- 1) Kegiatan perencanaan meliputi:

Perencanaan ruang/komponen rumah yang mendesak diperbaiki, perencanaan kebutuhan bahan bangunan dan tempat pembelian, perencanaan tenaga kerja yang akan dilibatkan, serta jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- 2) Kegiatan pelaksanaan perbaikan

Dengan kendala keterbatasan dana, maka pelaksanaan perbaikan rumah dibatasi maksimal selama 10 hari.

- 3) Kegiatan pengawasan

Pengawasan dilakukan secara berkala pada kegiatan pekerjaan perbaikan rumah. UPKM menunjukan tenaga pengawas yang bertugas memberikan laporan pengawasannya kepada UPKM, guna keperluan administrasi pelaporan kemajuan pekerjaan UPKM kepada Dinas Sosial

- 4) Kegiatan pelaporan

Pembuatan laporan secara berkala mengenai kemajuan pekerjaan perbaikan rumah. Laporan kemajuan pekerjaan secara berkala terdiri dari laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir pelaksanaan program.

c. Sumber dan alokasi Dana

Sumber pembiayaan program RSDK bersumber dari dana APBD Kota Surabaya yang tertuang dalam Dana Alokasi Satuan Kerja (DASK) Dinas Sosial Kota Surabaya yang pada tiap tahunnya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah Kota Surabaya. Dana yang ada dialokasikan

digunakan untuk kegiatan pelatihan usaha, kegiatan perbaikan rumah, dan kegiatan pembentukan dan penguatan UPKM. Sumber dana program RSDK berasal dari dana APBD kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

Sumber dana program RSDK merupakan dana hibah yang dimana dalam pasal 42 ayat 1 menjelaskan bahwa dana hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Oleh karena itu dana program RSDK diberikan dalam bentuk kegiatan dan barang, seperti kegiatan penguatan UPKM yang disertai dengan stimulant peralatan kerja dan kegiatan pelatihan ketrampilan yang disertai dengan stimulant peralatan kerja. Khusus pada kegiatan perbaikan rumah, bantuan bersifat pinjaman yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan dan tenaga kerja, dimana penerima bantuan perbaikan rumah tersebut harus mengembalikan dengan cara angsuran dalam bentuk dana yang nantinya harus digulirkan oleh UPKM setempat kepada keluarga miskin lainnya yang sesuai dengan kriteria yang ada di wilayah kelurahan yang sama. Jadi dana untuk bantuan perbaikan rumah merupakan dana pinjaman yang harus diadministrasikan dan digulirkan oleh UPKM setempat



kepada keluarga miskin lainnya. Penguliran dana ini tidak dikembalikan lagi ke Dinas Sosial, tapi dikelola langsung oleh UPKM setempat.

d. Penyiapan Kelembagaan/Organisasi

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, pencapaian tujuan, pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif dan berkelanjutan program maka dalam program RSDK membentuk organisasi pelaksana program. dalam pelaksanaan program RSDK, dibentuk tim koordinasi pada beberapa instansi yang terkait, yaitu sebagai berikut :

a) Di Tingkat Kota

Pemerintah Kota berperan menjamin kelancaran pelaksanaan program RSDK. Penanggung jawab pelaksanaan program RSDK adalah Dinas Sosial kota Surabaya, yang untuk kelancaran tugasnya membentuk Tim koordinasi antar instansi terkait di tingkat kota. Tugas Dinas Sosial dalam pelaksanaan program RSDK, antara lain adalah :

- 1) Membentuk tim koordinasi di Dinas Sosial dan penanggung jawab operasional di tingkat kelurahan.
- 2) Membangun kerjasama antar para pelaksana program RSDK, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat.
- 3) Mengalokasikan Biaya Operasional Proyek (BOP).
- 4) Pemasyarakatan program RSDK kepada instansi pemerintah ditingkat kota termasuk kecamatan dan kelurahan di wilayahnya.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program RSDK dan menerima laporan kegiatan.

- 6) Berkoordinasi dengan organisasi masyarakat / UPKM, untuk menyelesaikan masalah dan konflik yang muncul serta menangani pengaduan yang tidak dapat diselesaikan.

b) Di Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan untuk yang masuk dalam pelaksanaan program RSDK adalah :

1) Camat dan perangkatnya

Peran dan tugas Camat dan perangkatnya adalah :

Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan program RSDK di wilayahnya, dengan rincian tugas yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi program RSDK kepada lurah dan perangkat kelurahan di wilayahnya.
- b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dalam pelaksanaan program RSDK di wilayahnya.
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan program RSDK di wilayahnya melalui laporan para lurah.
- d. Mendorong dan mendukung tumbuhnya partisipasi warga masyarakat di wilayahnya.
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mengadakan forum komunikasi dengan organisasi masyarakat/UPKM.

c) Di Tingkat Kelurahan

Secara umum peran utama Lurah adalah memberikaan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program RSDK di wilayahnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui program RSDK dapat tercapai dengan baik. Rincian tugas dan tanggung jawab Lurah dalam pelaksanaan program RSDK adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu sosialisasi awal program RSDK keseluruhan masyarakat di kelurahan bersangkutan.
- 2) Memfasilitasi proses pengambilan keputusan oleh mayarakat untuk menerima/menolak program RSDK termasuk atas nama warga mengajukan surat ke Dinas Sosial.
- 3) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan UPKM dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan program RSDK.
- 4) Membantu memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program RSDK termasuk peninjauan lapangan.
- 5) Mendorong tumbuh berkembangnya proses pembangunan partisipasi di kelurahannya.

e. Pelaksanaan Program di Masyarakat

Pelaksanaan program RSDK Dalam pelaksanaannya program RSDK di Kota Surabaya harus menerapkan beberapa prinsip dasar, agar pelaksanaan program

bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga miskin di Kota Surabaya. Prinsip dalam pelaksanaan tersebut adalah:

a) Akseptabel

Seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

b) Transparan

Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan program.

c) Akuntabel

Dalam setiap penyelenggaraan program harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Keterpaduan

Dalam penyelenggaraan program harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

e) Kemitraan

Dalam pelaksanaan program diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

f) Keberlanjutan

Dalam menyelenggarakan program dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

g) Kesetiakawanan

Dalam penyelenggaraan program harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

h) Keadilan

Dalam penyelenggaraan program harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

i) Kemanfaatan

Dalam penyelenggaraan program harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara. Dalam pelaksanaan program RSDK diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi fisik, sosial, ekonomi.

j) Partisipasi

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan program harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

k) Profesionalitas

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan program kepada masyarakat dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

2. Dampak dari Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya.

Dalam buku Soesilo Zauhar, 1993: 1, mengatakan bahwa dengan suatu program pembangunan berbagai macam masalah pembangunan dan kemasyarakatan dicoba dipecahkan. Dengan demikian semakin banyak permasalahan yang timbul maka semakin banyak pula program yang dibutuhkan. Dalam suatu program selalu memiliki tujuan, program RSDK merupakan program pencapaian tujuan. Dengan adanya Program RSDK ini diharapkan dapat memberdayakan potensi daerah yang berbasis pada pemberdayaan sumber daya lokal.

Sebagaimana yang telah diketahui, pelaksanaan program RSDK di Kota Surabaya tidak terlepas dari peranan Tim pendamping dan Konsultan, serta UPKM sebagai organisasi masyarakat pada dasarnya merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Dan sebagai motivator untuk menjalin kerja sama dan menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama, agar dapat mengatasi masalah kemiskinan secara mandiri.

Namun dalam mewujudkan keberhasilan dari program RSDK tidak hanya dibutuhkan peran penting dari UPKM, tapi sangat dibutuhkan peran yang besar pula dari masyarakat dalam pelaksanaan program RSDK. Karena pada dasarnya program RSDK adalah program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, yang dimana masyarakat dituntut untuk secara mandiri dapat mengatasi kemiskinannya. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Suryono (2010: 262), yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses

dimana masyarakat (khususnya bagi masyarakat yang kurang memiliki akses pada sumber-sumber daya pembangunan) harus didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Sehingga untuk mengetahui berhasil tidaknya pelaksanaan program RSDK ini dapat kita lihat dari dampak yang timbul dari adanya program RSDK. Hal ini bisa kita lihat dari perubahan-perubahan yang telah terjadi, diantaranya :

a. Dampak terhadap perubahan sosial

Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang menguntungkan atau positif maupun yang tidak menguntungkan atau negatif. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat berupa perubahan norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, susunan kekuasaan, dan wewenang. Perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat pada umumnya menyangkut hal yang kompleks.

Menurut Selo Soemardjan (dalam Martono, 2011), perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan sifat perubahan sosial yang berantai dan saling berhubungan antara satu unsur dengan unsur kemasyarakatan yang lainnya. Terdapat beberapa ciri-ciri perubahan sosial, yaitu :

- 1) Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat.

- 2) Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.
- 3) Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian.
- 4) Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat.

Dalam perubahan sosial juga terdapat beberapa bentuk perubahan sosial, yaitu :

- 1) Perubahan lambat

Perubahan lambat atau yang disebut dengan Evolusi (Alex Inkeles dalam Soekanto, 2006 : 269-271) adalah perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, dan kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.

- 2) Perubahan cepat

Sedangkan perubahan cepat atau revolusi adalah perubahan-perubahan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. secara sosiologis, agar suatu revolusi dapat terjadi, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu antara lain sebagai berikut :

- a) Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan.
- b) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
- c) Adanya pemimpin dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas menjadi program dan arah gerakan.
- d) Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat.
- e) Harus ada momentum yang tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan sehingga momentum tersebut tidak keliru dan revolusi tidak gagal.
- f) Faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial.

Soerjono Soekanto menyebutkan adanya faktor-faktor intern dan ekstern yang menyebabkan dan mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial, adalah :

1) Perubahan penduduk

Setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses sosial, antaranya adalah interaksi sosial dan sosialisasi. Dengan begitu secara cepat maupun lambat akan merubah pola pemikiran mereka dan tingkat pengetahuan yang akan lebih mempercepat proses perubahan. Disamping itu, perubahan penduduk yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah mengakibatkan kadar keramahan akan menurun, kelompok sekunder akan bertambah

banyak jumlahnya, struktur kelembagaan menjadi lebih rumit, dan bentuk-bentuk perubahan yang lainnya.

2) Penemuan-penemuan baru

Suatu proses sosial yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut inovasi. Hal tersebut diterima dipelajari dan dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan.

3) Pertentangan/konflik masyarakat

Umumnya masyarakat tradisional bersifat kolektif. Segala kegiatan dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat, kepentingan individu walaupun diakui, tetapi mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompoknya, dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Pertentangan-pertentangan tersebut kerap kali terjadi, apalagi pada masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ketahap modern.

Dalam pelaksanaan program RSDK sangat diharapkan muncul dampak dalam perubahan sosial dimasyarakat. Dampak yang terlihat dari perubahan sosial adalah bagaimana masyarakat mampu secara mandiri untuk mengatasi kemiskinan. Dimana masyarakat dapat menumbuhkan rasa kegotong royongan dan solidaritas yang dapat membantu dalam pembangunan rumah yang layak huni. Selain itu terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya organisasi lokal yang berkelanjutan. Sehingga diyakini mampu mengembangkan kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang baik.

Dalam program RSDK untuk menimbulkan dampak perubahan sosial adalah dengan cara memberikan pembekalan terhadap sumber daya manusia yang memiliki peranan penting terhadap pelaksanaan program RSDK. Sumber daya manusia tersebut meliputi lembaga lokal atau UPKM dan para aparatur yang terkait dengan pelaksanaan program RSDK.

b. Dampak terhadap perubahan lingkungan

Lingkungan adalah suatu media dimana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil. Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidup, manusia telah berusaha mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraan.

Berbagai definisi dari para ahli mengenai lingkungan, menurut St. Munajat Danusaputra (dalam Darsono, 1995) mengatakah bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Sedangkan menurut Emil Salim mengatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 angka 1 mengartikan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup dapat pula berbentuk lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan alam dan buatan adalah lingkungan fisik, dalam hal ini lingkungan fisik dapat diartikan sebagai semua keadaan yang terdapat disekitar tempat hidup, yang akan mempengaruhi pada individu tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan non fisik adalah lingkungan sosial budaya dimana manusia itu berada, dimana lingkungan sosial adalah lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spasial (ruang) yang ruang lingkupnya ditentukan oleh keberlakuan pola-pola hubungan sosial. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, selain itu lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia dan dapat memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia.

Kerusakan pada lingkungan dapat terjadi karena dua faktor yaitu faktor alami dan faktor buatan. Faktor alami disebabkan karena bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut dapat berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin putting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Sedangkan faktor buatan disebabkan oleh tangan jahil manusia sendiri, dimana manusia sebagai makhluk

berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia dapat berupa adanya penebangan pohon dan membuang sampah di sembarang tempat.

Kegiatan pemberdayaan lingkungan dalam program RSDK adalah kegiatan yang dilakukan guna peningkatan kondisi fisik lingkungan atau tempat tinggal. Kegiatan tersebut berupa perbaikan rumah tidak layak huni, yang dimana memperbaiki sarana dan prasarana yang dirasa kurang memadai. Banyaknya rumah yang masih kurang memadai dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan pada warga. Dengan adanya bantuan dari program RSDK menjadikan kondisi rumah yang lebih baik, sehat, rapi dan teratur dapat meningkatkan taraf hidup. Keberhasilan tidak hanya pada kondisi fisik rumah saja namun kesehatan masyarakat miskin semakin membaik.

c. Dampak terhadap perubahan ekonomi

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, perlu adanya program yang efektif, efisien, terpadu dan berorientasi pada kemandirian yang berkelanjutan. Pembangunan yang mendapat dukungan partisipasi rakyat akan lebih baik dari pada pembangunan yang hanya mengandalkan kekuatan pemerintah. Berbagai program penanganan kemiskinan sudah dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian : Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian

Pendidikan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dll.

Program pengentasan kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM-KUBE). Implementasinya sejak tahun 1983 dikembangkan Program KUBE hingga kini masih menjadi ikon Kementerian Sosial Republik Indonesia. KUBE adalah kelompok usaha binaan Kementerian Sosial RI yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan untuk melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dalam rangka kemandirian usaha, meningkatkan kesejahteraan sosial anggota memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Tujuan KUBE adalah mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui : (1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok; (2) Peningkatan pendapatan; (3) Pengembangan Usaha; (4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota Kube dan dengan masyarakat sekitar. Bentuk kegiatan KUBE adalah Pelatihan keterampilan berusaha, Pemberian bantuan stimulant sebagai modal kerja atau berusaha dan pendampingan.

Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) tergantung kepada bagaimana masyarakat dapat memberdayakan diri secara mandiri salah satunya dari segi ekonomi. Dengan adanya bantuan dari program RSDK masyarakat miskin penerima bantuan telah memiliki rumah yang layak huni sehingga mereka dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan nyaman dan tenang sehingga lebih bersemangat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan

sehari-hari dan dapat terhindar dari kemiskinan. Selain itu peningkatan dalam segi ekonomi dilakukan dengan memberikan pembekalan keterampilan usaha berupa tata boga dan kerajinan tangan, yang dimana nantinya masyarakat mampu mengimplementasikan keterampilan yang didapat guna menumbuhkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan keluarga. Untuk kegiatan pelatihan keterampilan usaha, target kegiatan adalah 400 orang yang dikelompokkan dalam 40 KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

Namun masih banyak sebagian besar dari masyarakat penerima bantuan tidak merasakan perubahan dari segi ekonomi. Hal ini disebabkan karena memang pada awalnya mereka tidak memiliki usaha untuk mendukung perekonomian keluarga. Selain itu ketidakmampuan dalam segi modal keuangan untuk membuka usaha baru. Sehingga perubahan dalam segi ekonomi dirasa kurang berdampak terhadap keluarga miskin.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya

Implementasi suatu program pada dasarnya tidak semuanya dapat mengalami keberhasilan secara utuh, karena pada kenyataannya masih banyak program-program yang tidak sedikit di Negara ini yang mengalaminya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi program, khususnya pada Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kota Surabaya.

a. Faktor Pendukung

1) Dana

Fungsi keuangan bertujuan untuk mengatur pencairan sumber-sumber dana yang dibutuhkan bagi organisasi dan kemudian mengatur penggunaan dari dana yang telah diperoleh. Sumber dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber dana intern yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri maupun sumber dana ekstern yang berasal dari luar organisasi. Dalam proses pengalokasian dana perlu adanya penyusunan suatu anggaran yang sistematis. Tujuan dari adanya penyusunan suatu anggaran adalah :

- a) Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum.
- b) Sebagai suatu alat untuk mengestimasi semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijaksanaan keuangan dimasa yang akan datang.
- c) Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi.
- d) Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam organisasi sehingga kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian, untuk tercapainya tujuan.

Secara umum tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Kesuksesan pelaksanaan program RSDK pada dasarnya didukung dengan adanya dana bantuan yang diberikan dari Dinas Sosial. Dengan adanya dana yang diberikan kepada lembaga lokal/UPKM maka dapat secara langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu dengan adanya dana tersebut, UPKM dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih berdaya.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Moenir (2000 : 119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/ pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan kerja organisasi. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

- a) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- b) Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
- c) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.

- d) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
- e) Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
- f) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- g) Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya.

Moenir (2000 : 120), membagi sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a) Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
- b) Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
- c) Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan suatu program, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendukung saja, namun tidak sedikitnya pelaksanaan program dipengaruhi oleh faktor penghambat yang dimana sangat memiliki pengaruh yang cukup besar pula dalam keberhasilan suatu program. Karena apabila faktor tersebut tidak dapat teratasi maka akan berdampak negative terhadap program tersebut.

1) Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang penting dalam pembangunan masyarakat. partisipasi merupakan salah satu dari tiga unsur pembangunan berorientasi masyarakat selain unsur keadilan dan unsur pemberdayaan. Partisipasi merupakan faktor penentu serta sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Seberapa kerasnya usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan, jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat serta tidak didukung oleh masyarakat, maka tingkat keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan program pembangunan akan berbeda dengan kondisi jika masyarakatnya berpartisipasi. Terdapat beberapa tahapan-tahapan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, yaitu :

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses pembangunan, biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berhasilnya suatu program pembangunan tergantung dari keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi.

c. Partisipasi dalam menerima hasil atau manfaat pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff banyak cara untuk mengklarifikasi dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas manfaat.

d. Partisipasi masyarakat dalam menilai pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff, membedakan tiga jenis evaluasi :

1. *Project Contered Evaluation*, bila evaluasi ini dipanang sebagai proses evaluasi formal.
2. *Political Activities*, berkaitan dengan pemilikan anggota-anggota parlemen rakyat setempat atau pemimpin setempat.
3. *Public Opinion Efforts*, opini publik dalam mengevaluasi suatu program tidak secara langsung melainkan mempengaruhi melalui media massa/surat kabar.

Pada pelaksanaan program RSDK yang dimana salah satu faktor penghambat disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan mengabaikan partisipasi masyarakat, sebaik apapun desain program tersebut, maka program tersebut hanya berupa program saja tanpa ada dampak atau hasil yang maksimal.

Sehingga diperlukan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa keuntungan berkaitan dengan proses pembangunan direncanakan dan partisipasi mereka lebih besar dari biayanya. Masyarakat diyakinkan bahwa mereka akan mendapat beberapa keuntungan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu



masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam beberapa tahap dari proses pembangunan yang direncanakan.

2) Kurangnya Pemahaman Masyarakat akan Pentingnya Pengguliran Dana

Pengguliran dana adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal. Secara umum dana guliran bertujuan untuk (a) meningkatkan aktivitas ekonomi, (b) meningkatkan volume usaha, (c) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, (d) meningkatkan etos kerja. Tingkat efektivitas dana guliran dinilai dari tingkat produktivitas dan tingkat kepuasan anggota. Tingkat produktivitas adalah kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, dan dampak dana bergulir. Tingkat kepuasan anggota adalah nilai elastisitas dampak dana bergulir terhadap, partisipasi anggota, etos kerja, biaya produksi.

Dalam pelaksanaan program RSDK salah satu tolak ukur keberhasilan keberlanjutan program RSDK adalah kegiatan pengguliran dana program ke masyarakat yang berjalan lancar. Karena dengan pengguliran dana ini dapat membantu keluarga miskin lainnya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Apabila masyarakat lancar dalam pengelolaan pengguliran dana, maka masyarakat tersebut mampu melakukan pemberdayaan secara mandiri dalam mengatasi kemiskinan. Beberapa hal penting yang harus dilakukan UPKM agar dalam mengadministrasikan pengguliran lancar adalah dengan memenuhi ketentuan pengguliran seperti berikut :

- a. UPKM harus membuka rekening tabungan Bank, atas nama lembaga UPKM dengan penanda tangan Ketua dan Bendahara.

- b. Setiap bulan pada tanggal 11, oleh UPKM uang angsuran harus disetorkan ke bank.
- c. Pengguliran dana pinjaman dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali.
- d. Pengambilan uang di Bank oleh UPKM, hanya untuk pencairan pinjaman (pengguliran) guna kegiatan Gakin, berdasarkan KRKK.
- e. Pengambilan uang di bank, harus dengan tanda tangan Ketua dan Bendahara, dan diketahui Lurah setempat
- f. Setiap 2 bulan sekali, UPKM harus melaporkan perkembangan dana bergulir kepada Lurah setempat, dengan dilampiri *print-out* buku tabungan.

Namun dalam pelaksanaan program RSDK masih terdapat keluarga miskin penerima bantuan yang kurang tertib dalam pengguliran dana, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya tujuan dari proses pengguliran dana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya bagi pemberdayaan masyarakat miskin, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Program SDK merupakan program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat dituntut untuk secara mandiri meningkatkan kesejahteraan, sehingga dalam pelaksanaan program RSDK alur komunikasi antar organisasi terkait menggunakan pendekatan *bottom up* yang dimana seluruh pelaksanaan dilapangan diatur oleh lembaga lokal yang disebut UPKM. Sasaran program RSDK adalah keluarga miskin yang berdomisili asli di kelurahan tersebut dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dengan kepemilikan tanah tidak dalam kondisi sengketa yang dimana dalam pelaksanaan dilapangan pemberian bantuan RSDK sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Dalam proses pengelolaan anggaran dana. Anggaran pelaksanaan program RSDK bersumber dari dana APBD yang dimana dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pelatihan usaha, kegiatan perbaikan rumah dan kegiatan pembentukan dan penguatan lembaga lokal atau UPKM. Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk kegiatan dan barang, yang dimana dana tersebut merupakan dana hibah

yang nantinya akan digulirkan kembali untuk masyarakat miskin yang dikelola oleh lembaga lokal atau UPKM. Namun ditemukan kendala dalam pengguliran dana yang dimana masyarakat ada yang terlambat dalam membayar pengguliran dan ada pula yang tidak membayar pengguliran dana tersebut.

3. Beberapa manfaat dengan adanya program RSDK ini, telah membawa dampak yang berarti kepada masyarakat miskin penerima bantuan, adapun dampak tersebut yaitu :

- a) Dampak terhadap perubahan sosial

Dampak terhadap perubahan sosial ditujukan pada sumber daya manusia, dimana dapat dilihat pada bagaimana masyarakat mampu secara mandiri untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya lembaga lokal yaitu UPKM yang dimana dapat bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin secara mandiri dengan memberikan pembinaan kepada keluarga miskin penerima bantuan dikeluruhannya.

- b) Dampak terhadap perubahan lingkungan

Dampak perubahan lingkungan telah dirasakan oleh keluarga penerima bantuan, yang dimana kondisi rumahnya dirasakan semakin membaik. Sehingga lebih layak untuk dihuni dan dapat pula meningkatkan kesehatan masyarakat miskin.

- c) Dampak terhadap perubahan ekonomi

Dengan adanya bantuan perbaikan rumah, keluarga miskin penerima bantuan diharapkan dapat lebih produktif dan memiliki semangat untuk bekerja sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga dengan mengembangkan pelatihan usaha yang diberikan. Namun ditemukan kendala dalam pengembangan usaha yang dimana masyarakat miskin tidak dapat mengembangkan usaha atau memulai suatu usaha dikarenakan terhalang dengan biaya modal. Sehingga dampak dari segi ekonomi dirasakan kurang optimal.

4. Dalam pelaksanaan program RSDK terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Dalam faktor pendukung dapat ditinjau dari dana dan sarana prasarana yang diberikan. Karena dengan adanya dana maka kegiatan dalam program RSDK dapat berjalan dengan lancar, sama halnya dengan sarana dan prasarana yang ada dapat membantu mempermudah kinerja dan mendukung dalam pelaksanaan program RSDK, yang dimana sarana dan prasarana yang diberikan berupa stimulan-stimulan yang mendukung pelaksanaan program pelatihan keterampilan dan penyiapan peralatan kerja bagi UPKM. Sedangkan dalam faktor penghambat pelaksanaan program RSDK adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang dimana masyarakat pasif terhadap kegiatan program RSDK sehingga masyarakat harus diberikan dorongan untuk mau berpartisipasi. Selain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, faktor yang menghambat pelaksanaan program RSDK adalah kurangnya

pemahaman masyarakat akan pentingnya pengguliran dana yang dimana masyarakat beranggapan bahwa dana yang diberikan oleh Dinas Sosial adalah dana bantuan yang tidak perlu dikembalikan. Namun pada kenyataannya pengguliran dana tersebut tidak dikembalikan kepada Dinas Sosial melainkan kepada UPKM yang nantinya akan digulirkan kembali kepada keluarga miskin lainnya yang ada dikelurahan tersebut.

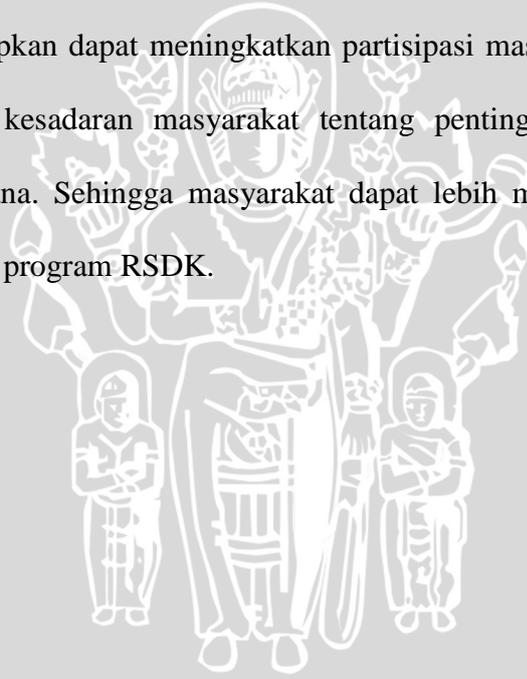
B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian dan kesimpulan di atas tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, masih terdapat kekurangan-kekurangan baik itu dalam pengelolaan maupun pelaksanaan. Saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan UPKM untuk memberi tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Misalnya dengan pemberian *reward* atau penghargaan kepada masyarakat miskin yang melakukan pembayaran angsuran pinjaman tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat termotivasi untuk membayar angsuran tepat waktu. Sehingga dalam proses pengguliran dana dapat terlaksana dengan baik
2. Dalam meningkatkan dampak terhadap perubahan ekonomi dimasyarakat, diperlukan adanya peningkatan dan pengembangan pendampingan terhadap KUBE. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang menangani dalam pengembangan usaha mikro di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat

membantu KUBE dalam masalah keuangan dan kemitraan terhadap pihak luar. Sehingga efektivitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sasarannya secara lebih besar.

3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin antara UPKM dengan keluarga miskin penerima bantuan secara intensif dalam suasana informal untuk khususnya membahas tentang pelaksanaan program RSDK. Dengan pertemuan rutin tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dampak dari pengaliran dana. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami maksud dan tujuan dari program RSDK.



DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Public*. Bandung: CV. Alfabeta.

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Hasibuan, Sayuti. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler*. Muhammadiyah University Press and Magister Manager UMS. Surakarta.

Islamy, Irfan. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.

Moenir. 2000. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta : Bina Aksara.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Nasir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sudarwati, ninik. 2009. *Kebijakan pengentasan kemiskinan*. Malang: intimedia

Suharto, Edi. 2006. *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang. UB Press.

Suzetta, Paskah. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran Yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin*. Jakarta: SMERU.

Tim Pembina Matakuliah Analisis Kebijakan Publik. 2002. *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Puslitabmas Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Tim Pembina Matakuliah Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik. 2001. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Puslitabmas Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Widodo, J. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisa Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Banyumedia.

Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang : IKIP Malang.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya.

Laporan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya (RSDK) Tahun 2011

Internet

Lababa, djunaidi. 2008. "Evaluasi Program Sebuah Pengantar", diakses pada 15 September 2012 dari <http://evaluasiendidikan.blogspot.com>.

Rahmiwati. 2008. "Analisis Data Kualitatif", diakses pada 20 Januari 2012 dari <http://rahmiwati.net/analisis-data-kualitatif.html>.

SAMPLING FOTO PERBAIKAN RUMAH

01				
0 %		50 %		100 % 
02				
0 %		50 %		100 % 
03				
0 %		50 %		100 % 
04				
0 %		50 %		100 % 
05				
0 %		50 %		100 % 

SAMPLING FOTO KEGIATAN SOSIALISASI TINGKAT KOTA



SAMPLING FOTO KEGIATAN SOSIALISASI TINGKAT KELURAHAN



SAMPLING FOTO PENYIAPANAN DAN PEMBEKALAN UPKM



SAMPLING FOTO PELATIHAN KETERAMPILAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah awal mula munculnya program RSDK?
2. Apa landasan hukum dari program RSDK?
3. Apa tujuan dari program RSDK?
4. Apa manfaat yang timbul dari program RSDK?
5. Siapa sajakah aktor yang terkait dengan program RSDK?
6. Sasaran dari program RSDK?
7. Darimanakah sumber dana dan besaran atau jumlah dana untuk program RSDK?
8. Bagaimanakah cara atau mekanisme pengaturan Dana?
9. Bagaimanakah penyiapan kelembagaan dan program di masyarakat?
10. Bagaimanakah komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana?
11. Dampak dari program RSDK dari segi perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan?
12. Bagaimanakah pengaruh kinerja aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan program RSDK?
13. Bagaimanakah pengaruh tingkat SDM masyarakat terhadap program RSDK?
14. Bagaimanakah pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap program RSDK?

PEDOMAN WAWANCARA

UPKM

1. Apakah sasaran dari Program RSDK sudah sesuai dengan criteria yang ditentukan??
2. berapakah dana yang diberikan dinas sosial dalam pelaksanaan program?
3. bagaimanakah mekanisme pengaturan dana oleh UPKM?
4. Apa saja bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh UPKM kepada masyarakat miskin dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)?
5. bagaimanakah komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan (dinas sosial, UPKM, dan masyarakat)?
6. bagaimanakah penyiapan kelembagaan dan program masyarakat?
7. bagaimanakah pelaksanaan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni?
8. bagaimanakah pembekalan yang diberikan dinas sosial kepada UPKM dan masyarakat?
9. bagaimanakah pembekalan pelaksanaan pelatihan keterampilan usaha?
10. bagaimanakah dampak dari program RSDK dari segi lingkungan, ekonomi dan sosial?
11. bagaimanakah pengaruh kinerja dinas sosial dalam pelaksanaan RSDK?
12. Bagaimanakah tingkat SDM masyarakat dalam kegiatan program RSDK?
13. bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendorong terlaksananya program RSDK?
14. Bagaimanakah mekanisme peminjaman modal?
15. Upaya apa sajakah yg dilakukan UPKM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (dalam hal pengguliran dana)?
16. Kendala apa saja yang dihadapi UPKM dalam pelaksanaan RSDK?
17. Apa saran bapak/ibu untuk program RSDK?

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT

1. Brapa usia Bapak/ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
3. brapa jumlah keluarga bapak atau ibu (dalam satu rumah)?
4. brapa jumlah pengeluaran sehari-hari bapak/ ibu?
5. brapa lama ibu/bapak tinggal di rumah tersebut?
6. mulai kapan bapak/ibu menerima bantuan program RSDK?
7. bagaimanakah pendapat bapak/ibu mengenai program RSDK?
8. Apakah pengaruh dari bantuan RSDK terhadap kehidupan sehari-hari (aspek lingkungan ekonomi dan sosial)?
9. Kendala apa yang dirasakan dalam implementasi program RSDK?
10. Apa sajakah kekurangan dari program RSDK?
11. apakah bapak/ ibu sudah mendapatkan pelatihan dari program RSDK?
12. Bagaimanakah manfaat dari pelatihan yg diberikan?
13. bagaimanakah pendapat bapak/ ibu mengenai dana guliran?
14. bagaimanakah cara bapak/ ibu untuk dapat mengembalikan dana guliran?
15. Apa saran bapak/ibu pada program RSDK?



CURRICULUM VITAE

Nama : Widya Putri Nugrahani

Nomor Induk Mahasiswa : 0910313141

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Desember 1990

Pendidikan : 1. SDN Pacarkeling 8 Surabaya Tamat Tahun 2003
 2. SMP Negeri 6 Surabaya Tamat Tahun 2006
 3. SMA Negeri 9 Surabaya Tamat Tahun 2009
 4. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu
 Administrasi Universitas Brawijaya, Masuk Tahun
 2009

Pengalaman Organisasi : 1. HUMANISTIK Sebagai Staf Biru Muda Periode
 2010-2011
 2. HUMANISTIK Sebagai Sekretaris Umum II
 Periode 2011-2012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
 Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
 E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
 - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
 • Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 1666 /UN 10.3/PG/2012
 Lampiran : 1 Eksemplar
 Perihal : Riset
 Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
 di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Widya Putri Nugrahani
 Alamat : Jl. Kalikeping Jaya 9 / 28 Surabaya.
 NIM : 0910313141
 Jurusan : Administrasi Publik
 Konsentrasi : -
 Tema : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya.
 Lamanya : 3 Bulan
 Peserta : 1 Peserta

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 23 Oktober 2012

Menyetujui,
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Adm. Publik
 Ub. Sekretaris



Drs. Minto Hadi, M.Si
 NIP. 19540127 198103 1 003





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 - 4 Telp. (031) 5473284, Fax. 5343000

SURABAYA (60272)

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey / Riset
Nomor : 070 / 19454 / 436.7.3 / 2012

MENUNJUK : SURAT : UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
NOMOR : 10661 / UN.10.3 / PG / 2012
TANGGAL : 23 Oktober 2012
PERIHAL : Riset

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya.
5. Surat Kepala Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur tanggal 04 Juli 2012 Nomor : 070/6959/203.3/2012 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Riset / Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : WIDYA PUTRI NUGRAHANI
Alamat : Jl. Kali Kepiting Jaya 9 / 28 Surabaya
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
Tema / Acara Survey / Riset : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) KOTA SURABAYA
Daerah / Tempat dilakukan survey : KOTA SURABAYA (Dinas Sosial)
Lamanya Survey : 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat dikeluarkan
Pengikut : -

Syarat – syarat ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan, dan yang bersangkutan harus mentaati ketentuan / peraturan yang berlaku dimana dilakukan kegiatan Survey / Research / Penelitian.
2. Penelitian yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Yang bersangkutan sebelum dan sesudah melakukan Penelitian / Kegiatan harap melaporkan pelaksanaan dan hasilnya pada Dinas / Instansi yang bersangkutan.
4. Surat Keterangan ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat / ketentuan seperti tersebut diatas.

Surabaya, 09 Nopember 2012



Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
2. Sdr. Kajor. Administrasi Publik UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
3. Sdr. Yang bersangkutan

ABDULHAKIM, SH., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP 19620304 198703 1 017

